

**LAPORAN
KINERJA
TAHUN 2024**

**KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM**

**KANTOR WILAYAH
KALIMANTAN TIMUR**

KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur Tahun 2024 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur selama Tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur juga merupakan alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang didokumentasikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja menjadi dasar dalam menganalisa pencapaian program atas kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur. Capaian kinerja Tahun 2024 yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan cerminan kinerja dari seluruh komponen pegawai yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur Tahun 2024. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur 2020 – 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 menggambarkan Capaian Kinerja Tahun 2024. Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menjadi media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur, sehingga dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.



Samarinda, 15 Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. M. IKMAL IDRUS, SH., MH
NIP. 196903182003121002

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Berangkat dari pemikiran tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berfungsi sebagai alat akuntabilitas kinerja bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur selama Tahun 2024 yang berlandaskan pada pelaksanaan mandat yang diemban oleh organisasi. Selain fungsi akuntabilitas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sekaligus memenuhi kebutuhan internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur guna melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka penyempurnaan kinerja organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur kepada publik atas pelaksanaan mandat konstitusi dan visi-misi Presiden Republik Indonesia yang diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2024 yang terdiri dari :

SASARAN STRATEGIS

- 01 Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
- 02 Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;
- 03 Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- 04 Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
- 05 Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
- 06 Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- 07 Meningkatkan kompetensi strategis sumber daya manusia di Bidang Hukum dan HAM; dan
- 08 Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Kegiatan

24

Kinerja Keuangan TA.2024

Nilai
IKPA
TA.2024
97.61%

Nilai
SMART
TA.2024
86.79%

**Perbandingan Alokasi Anggaran Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur Tahun 2024 dengan Alokasi Tahun 2023**

No	PROGRAM (UNIT ESELON I)	2024	2023
1.	Program Dukungan Manajemen(Sekretariat Jenderal)	Rp. 25.972.053.000	Rp. 20,099,233,000
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum)	Rp. 5.859.270.000	Rp. 3.630.000.000
3.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)	Rp. 1.026.444.000	Rp. 748.098.000
4.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum(Direktorat Jenderal Keimigrasian)	Rp. 3.248.024.000	Rp. 1.753.598.000
5.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum(Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)	Rp. 1.489.616.000	Rp. 1,139,906,000
6.	Program Pembentukan Regulasi (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)	Rp. 493.000.000	Rp. 343.000.000
7.	Program Pemajuan dan Penegakan HAM (Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia)	Rp. 407,486,000	Rp. 269,236,000
8.	Program Pembentukan Regulasi (Badan Pembinaan Hukum Nasional)	Rp. 2.398.110.000	Rp. 2.200.543.000
9.	Program Dukungan Manajemen (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)	Rp. 260,045,000	Rp. 207,976,000
Jumlah		Rp. 41.154.455.489	Rp. 30.391.590.000

Dari perbandingan Alokasi anggaran Tahun 2024 dan tahun 2023 diatas, anggaran capaian Program secara keseluruhan mengalami kenaikan dengan total realisasi anggaran 9 Petikan DIPA dari unit Eselon 1 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dari total pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. **41.154.455.489,-**, dari total anggaran tahun 2023 yaitu Rp. **30.391.590.000,-**.

Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2024

NO	PROGRAM (ESELON 1)	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SISA TOTAL (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen(Sekretariat Jenderal)	25,972,053,000	25,910,306,528	99.76%	61,746,472
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum)	5,859,270,000	5,833,893,542	99.57%	25,376,458
3	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)	1,026,444,000	1,019,562,442	99.33%	6,881,558
4	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Keimigrasian)	3,248,024,000	3,147,571,893	96.91%	100,452,107
5	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)	1,489,616,000	1,489,107,140	99.97%	508,860
6	Program Pembentukan Regulasi (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)	493,000,000	492,985,307	100.00%	14,693
7	Program Pemajuan dan Penegakan HAM (Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia)	407,486,000	407,453,738	99.99%	32,262

8	Program Pembentukan Regulasi (Badan Pembinaan Hukum Nasional)	2,398,110,000	2,397,602,261	99.98%	507,739
9	Program Dukungan Manajemen (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)	260,045,000	257,255,765	98.93%	2,789,235
	Jumlah	41.154.048.489	41.154.048.000	99.34%	198.309.384

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur selalu berusaha mengupayakan kinerja yang optimal dalam mencapai sasaran program dan kegiatannya. Capaian tersebut ditunjukkan melalui capaian masing-masing indikatornya.

Di Tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur melaksanakan 9 Program dari 9 Unit Eselon I yang terdiri dari 16 Sasaran Kegiatan dan 24 Indikator Kinerja



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah akuntabel dengan harapan:

1. Dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Mewujudkan transparansi pada instansi pemerintah;
3. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan
4. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Hal ini dimungkinkan karena dengan menerapkan SAKIP setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (*Performance Report*) yang secara sistematis akan mengarahkan instansi pemerintah dalam pencapaian tujuannya, pelaksanaan tugas dan fungsinya sampai dengan pertanggungjawaban atas hasil kerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan juga Rencana Strategis tahun 2020-2024. Laporan ini juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur di masa yang akan datang.

Berdasarkan 16 sasaran kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja Kantor Wilayah Kalimantan Timur tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja dengan sumber anggaran yang berasal dari:

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA- 013.01.2.408855/2024 Tanggal 24 November 2023;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA- 013.03.2.408852/2024 Tanggal 24 November 2023;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kemenkumham RI (Ditjen PAS) Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA- 013.05.2.408853/2024 Tanggal 24 November 2023;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI (Ditjen Imigrasi) Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA- 013.06.2.408854/2024 Tanggal 24 November 2023;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA- 013.07.2.408856/2024 Tanggal 24 November 2023;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA- 013.10.2.408859/2024 Tanggal 24 November 2023;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan HAM (BALITBANG HAM) Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA- 013.11.2.408860/2024 Tanggal 24 November 2023;

8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA- 013.09.2.408858/2024 Tanggal 24 November 2022; dan
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- undangan (PP) Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA- 013.08.2.408857/2024 Tanggal 24 November 2023

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas para kepala Divisi (Administrasi, Masyarakat, Keimigrasian serta Pelayanan Hukum dan HAM). Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat;
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Sejalan dengan upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatnya pelayanan publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan pelayanan publik sebagai berikut:

1. Pelayanan Masyarakat (Warga Binaan Masyarakat)
2. Pelayanan Informasi Keimigrasian
3. Pelayanan Jasa Hukum
 - a. Di bidang Kenotariatan (pengambilan sumpah notaris)
 - b. Di bidang Fidusia (permohonan sertifikat jaminan fidusia-*online*)
 - c. Di bidang kewarganegaraan (Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia)
4. Pelayanan Kekayaan Intelektual Permohonan di bidang Kekayaan Intelektual:
 - a. Pendaftaran Merek
 - b. Permohonan Hak Cipta
 - c. Pendaftaran Paten
 - d. Pendaftaran Desain Industri
5. Pelayanan Komunikasi Masyarakat dengan melakukan Mediasi atas pengaduan masyarakat tentang pelanggaran dan pemenuhan HAM

6. Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
7. Pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dengan cara Menyediakan anggaran Bantuan Hukum cuma-cuma melalui Organisasi Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin yang sedang berperkara di Pengadilan.

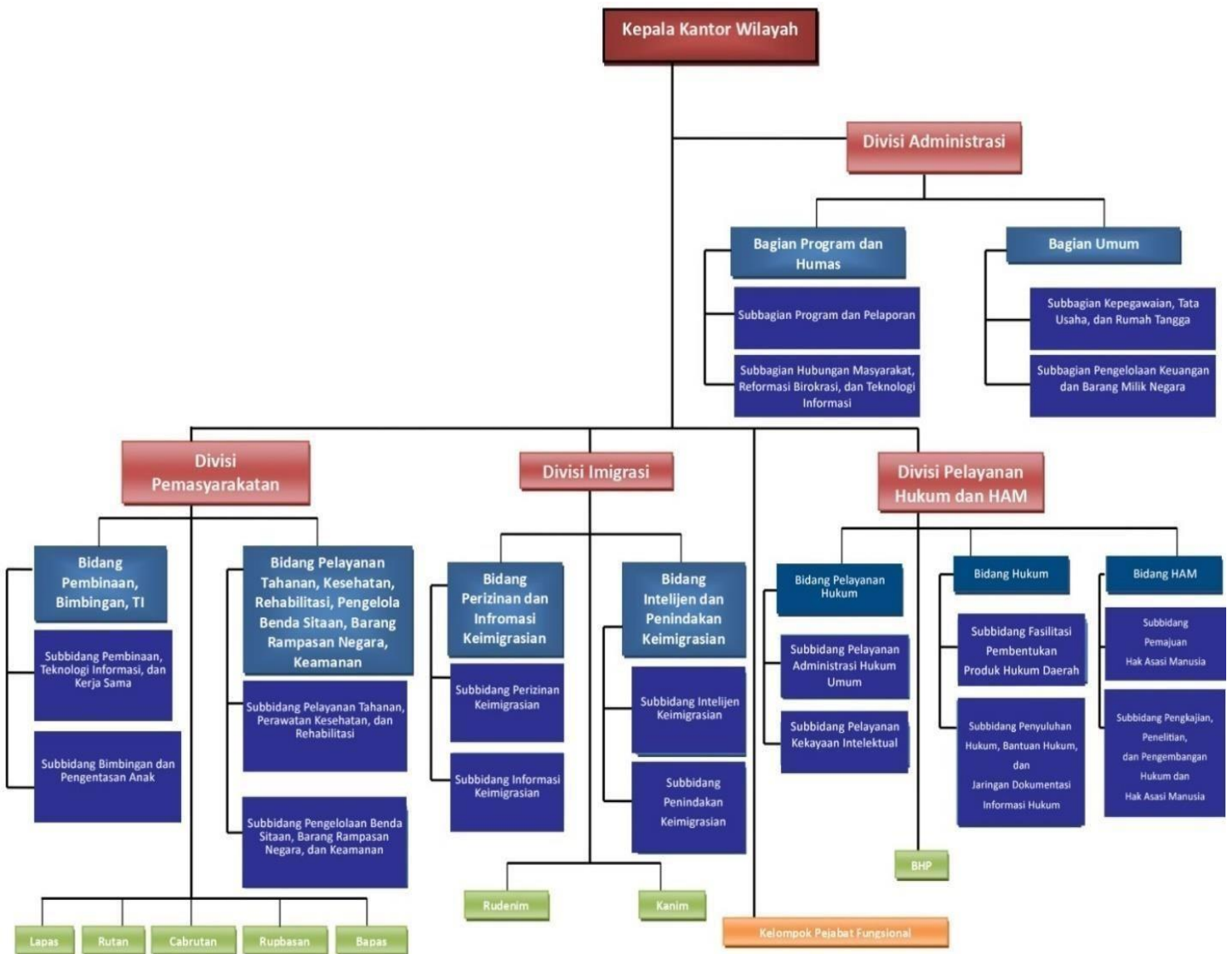
3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, terdiri dari:

1. 1 (satu) orang Kepala Kantor Wilayah;
2. 4 (empat) orang Kepala Divisi:
 - a. Kepala Divisi Administrasi,
 - b. Kepala Divisi Pemasyarakatan,
 - c. Kepala Divisi Keimigrasian dan
 - d. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. 2 (dua) orang Kepala Bagian:
 - Bagian Umum dan
 - Bagian Program dan Hubungan Masyarakat
4. 7 (tujuh) orang Kepala Bidang:
 - a. Bidang Pemasyarakatan,
 - Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi; dan
 - Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan.
 - b. Bidang Keimigrasian
 - Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian; dan
 - Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian.
 - c. Bidang Pelayanan Hukum dan HAM
 - Bidang Pelayanan Hukum;
 - Bidang Hak Asasi Manusia; dan
 - Bidang Hukum.
5. 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian
 - Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi
 - Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga
 - Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
6. 14 (empat belas) orang Kepala Sub Bidang
 - Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama
 - Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
 - Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
 - Sub Bidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan
 - Sub Bidang Perizinan Keimigrasian
 - Sub Bidang Informasi Keimigrasian
 - Sub Bidang Intelijen Keimigrasian

- Sub Bidang Penindakan Keimigrasian
- Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
- Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
- Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Hukum Daerah
- Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH
- Sub Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia
- Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM

Struktur Ogranisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur



Satuan Kerja / Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur

Pengertian Unit Pelaksana Teknis dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah "Satuan Kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya". Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Provinsi Kalimantan Timur yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur membawahi 23 satker, berupa:

1. 8 (delapan) Lembaga Masyarakat;
2. 4 (empat) Rumah Tahanan Negara;
3. 1 (satu) Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
4. 3 (tiga) Balai Masyarakat;
5. 1 (satu) Rumah Penyimpanan Barang Rampasan dan Barang Sitaan Negara;
6. 5 (lima) Kantor Imigrasi;
7. 1 (satu) Rumah Detensi Imigrasi.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Berangkat dari pemikiran tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur. Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur Tahun 2024 berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang pada intinya melaporkan hasil sebagai kinerja program dan keluaran sebagai kinerja kegiatan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berfungsi sebagai alat akuntabilitas kinerja bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur selama Tahun 2024 dilandaskan pada pelaksanaan mandat yang diemban oleh organisasi. Selain fungsi akuntabilitas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sekaligus memenuhi kebutuhan internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur guna melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka penyempurnaan kinerja organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menyajikan dan mengupas capaian kinerja sasaran program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur.

2. Tujuan

Sebagai wujud pemerintahan yang baik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah. Dalam laporan ini dijelaskan capaian kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur pada Tahun 2024 sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, khususnya dalam melaksanakan tugas teknis dan fasilitatif dibidang hukum dan hak asasi manusia.

D. Aspek Strategis

Aspek Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang dalam melaksanakan tugas Kantor Wilayah juga menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat;

5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan kemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

E. Isu Strategis

Beberapa kendala yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur Tahun 2024 diantaranya:

1. Adanya kebijakan nomenklatur penganggaran yang membatasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan wilayah, berdasarkan surat dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.2-HN.02.02-03 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) dimana kegiatan pelaksanaan harmonisasi ke kab/kota disebutkan secara tegas dalam rincian kertas kerja sehingga kurang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan;
2. Maraknya tindak pidana perdagangan orang, sehingga kantor wilayah perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya hal tersebut;
3. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pemberian layanan publik;
4. Keterbatasan dalam kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pada kantor wilayah Kalimantan Timur.

F. Sistematika Laporan

Sistematika dalam Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis
- E. Isu Strategis
- F. Sistematika Pelaporan

BAB II Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Capaian Kinerja Anggaran
- D. Capaian Kinerja Lainnya

BAB IV Penutup

- A. Simpulan
- B. Saran

Lampiran-lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran RPJM ke-3 yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Dalam mendukung prioritas Presiden, program dan kegiatan Kementerian/ Lembaga ditujukan untuk: menciptakan supremasi hukum; memberdayakan masyarakat untuk sadar Hukum dan HAM; memperkuat manajemen dan kelembagaan secara nasional; dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program dan kegiatan tersebut dijadikan kerangka dasar dan arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan di Kementerian Hukum dan HAM.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur mengadopsi Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 33 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sebagaimana amanah Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap instansi wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Renstra juga memuat Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

1. Visi

Untuk merumuskan kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disusunlah Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan Visi dimaksudkan untuk:

- a. mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh organisasi
- b. memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
- c. menjadi perekat dan menyatukan gagasan strategis yang terdapat pada organisasi
- d. memiliki orientasi kepada masa depan
- e. mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran organisasi
- f. menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

- a. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;

- b. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
- c. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
- d. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
- e. Transformasi ekonomi

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, Visi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

- a. membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
- b. melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- c. menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
- d. memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
- e. melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

2. Misi **BerAKHLAK** Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

- a. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional
- b. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas
- c. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakat yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya
- d. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan
- e. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- f. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakat
- g. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

3. Tata Nilai BerAkhilak

Merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya *Core Values* ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Sedangkan **#banggamelayanibangsa** merupakan *Employer Branding* ASN yang melayani sepenuh hati.

Core Values ASN menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja, yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah, sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo “ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai *core values* yang sama”. Adapun Panduan Perilaku *Core Values* ASN BerAKHLAK sebagai berikut:

a. Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
- Melakukan perbaikan tiada henti.

b. Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

c. Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

d. Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

e. Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjagarahasia jabatan dan negara.

f. Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
- Bertindak proaktif.

g. Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

4. Tata Nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar berkegiatan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu **"PASTI"** yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi *problem solver* bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insstitusi terkait.

Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

B. Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran, mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: No.7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur. Target kinerja pada tingkat Rencana Strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam pencapaian visi misi seperti terlihat pada lampiran Perjanjian Kinerja.

Berikut merupakan rangkuman dari Perjanjian Kinerja Tahun 2024 antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur dengan 9 Unit Eselon I yang terdiri dari 8 Program, 16 Sasaran Kegiatan dan 24 Indikator Kinerja Kegiatan:

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dengan Unit Eselon I

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Layanan RB di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	100 %
		Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan	3.1 Indeks
2	Terwujudnya Penegakan Hukum Masyarakat di Wilayah	Indeks penegakan hukum masyarakat di wilayah	3.6 Indeks
3	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustitia di Kewilayahan yang ditangani	90 %
4	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80 %
5	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	11 Orang
6	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6 %
7	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan	90 %
8	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30 %
9	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70 %
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20 %
10	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %
11	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %
		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %

12	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %
13	Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen
14	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	90 %
		Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25 %
		Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35 %
		Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 Indeks
15	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90 %
16	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti	80 %

Berikut merupakan alokasi anggaran untuk masing-masing program di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tahun 2024:

No	Program (Unit Eselon I)		2024
1.	Program Dukungan Manajemen(Sekretariat Jenderal)	Rp.	25.972.053.000
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum)	Rp.	5.859.270.000
3.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)	Rp.	1.026.444.000
4.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum(Direktorat Jenderal Keimigrasian)	Rp.	3.248.024.000
5.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum(Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)	Rp.	1.489.616.000
6.	Program Pembentukan Regulasi (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)	Rp.	493.000.000
7.	Program Pemajuan dan Penegakan HAM (Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia)	Rp.	407,486,000
8.	Program Pembentukan Regulasi (Badan Pembinaan Hukum Nasional)	Rp.	2.398.110.000
9.	Program Dukungan Manajemen (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)	Rp.	260.045.000
Jumlah		Rp.	41.154.048.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja/ tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk dapat menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan dasar hukum Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi *Input*, *Output*, dan *Outcome*.

1. *Input*: segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya.
2. *Output*: segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik
3. *Outcome*: indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).

Capaian kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan. Capaian kinerja Tahun 2024 merupakan realisasi dari rencana kinerja Tahun 2024 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian/target berdasarkan indikator kinerja *outcome*.

Realisasi Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	100%	100%	100%
		Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan	3.1	3.42	110.32%
2	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	Indeks penegakan hukum pemsarakatan di wilayah	3.6	3.4	94.44%
3	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Penegakan Hukum di Kewilayahan yang ditangani	90%	33.33%	37.03%
4	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6	-11,30	-188.33%
5	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan	90%	96.22%	106.91%
6	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	100%	333.33%
7	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	70.72%	101.03%
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	50.46%	252.3%

8	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	96.60%	120.75%
9	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	11 Orang	11 Orang	100%
10	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	78,72%	314%
11	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	58,5%	71,70%
		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	63,93%	79,91%
12	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	75%	107%
13	Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
14	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan	Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%	75%	150%
		Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%	80%	320%

	Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%	80%	228%
		Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%	100%	133%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3.33%	16.93%	508.40%
15	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%	90%	100%
16	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti	80%	100%	125%

SASARAN KEGIATAN 1

Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Indikator Kinerja 1 : Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	100	100	100

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	-	-	-	100	100	100

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	-	-	-	-	100

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja kantor wilayah tersebut tidak terlepas dari peran seluruh jajaran kantor wilayah, anggaran yang tersedia, sarana prasarana serta komitmen seluruh jajaran Kantor Wilayah dalam mendukung dan mewujudkan layanan internal yang optimal di kantor wilayah Tahun 2024

Indikator Kinerja 2 : Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan	3.1	3.92	126.45

Berdasarkan Hasil Survei Integritas BALITBANGHAM pada triwulan III, nilai rata-rata Indeks Kepuasan Layanan Internal Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur sebesar 3.92. Target yang ditetapkan adalah 3,1 indeks sedangkan realisasinya adalah 3,92 indeks sehingga capaian kinerja rata ratanya adalah 126.45 %

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah}}{\sum \text{Target Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah}} \times 100 \%$$

3.92 indeks

$$\% = \frac{\quad}{3.1 \text{ indeks}} \times 100\%$$

$$\% = 126.45 \%$$

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan	3.1 indeks	3.90 indeks	125.93%	3.1 indeks	3.92 indeks	126.45%

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2024 dan 2023, realisasi Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah tahun 2023 sebesar 3,90 indeks meningkat pada tahun 2024 sebesar 3,92 indeks

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan	7.1 indeks	3.1 indeks	3.1 indeks	3.1 indeks	3.1 indeks
	Skala 10	Skala 4	Skala 4	Skala 4	Skala 4

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional

Penyebab Keberhasilan

Kantor Wilayah Kalimantan Timur beserta jajaran secara rutin melaksanakan survei internal dari sisi integritas seluruh pegawai secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pegawai dalam memperoleh pelayanan. Keseluruhan survei tersebut dilaksanakan secara elektronik dikenal dengan e-survey melalui <https://indek-bsk.kemenkumham.go.id/s/ILKBSK2024>. Keseluruhan hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan *good governance*.

Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai keberhasilan tersebut adalah masih ada sebagian kecil pegawai yang kurang memahami dengan isi kuesioner. Langkah strategis yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi adalah:

1. Membuat Nota Dinas kepada seluruh pegawai untuk rutin dan konsisten dalam melaksanakan survey integritas setiap bulannya;
2. Sharing info pada grup sebagai sarana penjangkauan pemahaman terkait kuesioner survey integritas.

Langkah-langkah tersebut di atas sudah terlaksana dengan capaian keberhasilan yang sangat memuaskan. Sehingga dalam pelaksanaan pemenuhan layanan kesekretariatan dapat berjalan dengan baik hampir tanpa kendala.

SASARAN KEGIATAN 2

Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan Di Wilayah

Indikator Kinerja : Indeks penegakan hukum pemasyarakatan di wilayah

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3,6 indeks	3,4 Indeks	94.44%

Capaian nilai tersebut dipengaruhi oleh komitmen jajaran pemasyarakatan Kantor Wilayah Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara konsisten., Jajaran Pemasyarakatan Kalimantan Timur meningkatkan layanan publik dengan mengembangkan layanan pemasyarakatan berbasis IT.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Penegakkan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	82 indeks	92.32 indeks	113.97 %	3.6 indeks	3.4 Indeks	94.44%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Penegakkan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	70	80 indeks	81 indeks	82 indeks	3.6 indeks

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional

a. Menurunnya presentase Overstaying

Data Penghuni dan Kapasitas Hunian

NO	UPT	JUMLAH TAHANAN	KAPASITAS	ISI HUNIAN	JUMLAH OVER STAYING	PERSENTESE OVER KAPASITAS
1	LP KELAS IIA BALIKPAPAN	3	626	811	0	29,55
2	LP KELAS IIA SAMARINDA	1	217	767	0	253,00
3	LP KELAS IIA TARAKAN	187	421	1372	3	181,47
4	LP KELAS IIA TENGGARONG	275	350	1425	0	228,57
5	LP KELAS IIA BONTANG	76	376	1728	0	339,36
6	LP KELAS IIB NUNUKAN	191	350	1308	0	219,14
7	LP NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA	0	450	1009	0	124,22
8	LPP KELAS II TENGGARONG	7	192	317	0	61,46
9	LPKA KELAS IIA TENGGARONG	3	150	75	0	0
10	RUTAN KELAS IIA SAMARINDA	469	442	1305	2	89,14
11	RUTAN KELAS IIB BALIKPAPAN	337	206	1144	0	163,73
12	RUTAN KELAS IIB TANAH GROGOT	181	160	735	1	246,25
13	RUTAN KELAS IIB TANJUNG REDEB	146	195	671	0	169,23
JUMLAH		1876	4235	12670	6	199.17

Dari table diatas, ada overstaying sebanyak 6 Orang, sehingga capaian kinerja dengan realisasi 0% yang artinya bahwa target tidak tercapai dikarenakan **terjadi overstaying**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja
Terwujudnya Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai Standar	Menurunnya Persentase tahanan yang overstaying	80 %	Realisasi dibagi target dikali 0 % Overstaying NIHIL

b. Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum

No	UPT	Jumlah Tahanan	Jumlah Tahanan yang diusulkan mengikuti layanan penyuluhan hukum	Jumlah Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum
1	LP KELAS IIA BALIKPAPAN	0	0	0
2	LP KELAS IIA SAMARINDA	0	0	0
3	LP KELAS IIA TARAKAN	106	106	106
4	LP KELAS IIA TENGGARONG	102	102	102
5	LP KELAS IIA BONTANG	120	120	30
6	LP KELAS IIB NUNUKAN	0	0	0
7	LP NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA	0	0	0
8	LPP KELAS II TENGGARONG	17	17	14
9	LPKA KELAS II TENGGARONG	1	1	0
10	RUTAN KELAS I SAMARINDA	458	458	458
11	RUTAN KELAS IIB BALIKPAPAN	325	325	325
12	RUTAN KELAS IIB TANAH GROGOT	313	313	313
13	RUTAN KELAS IIB TANJUNG REDEB	0	0	0
Jumlah		1442	1442	1348

Perhitungan Kinerja Penurunan Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Terwujudnya Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai Standar	Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	80 %	93.48%	116.85%

c. Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum

No	UPT	Jumlah Tahanan	Jumlah Tahanan yang didaftarkan	Jumlah Tahanan yang disetujui
1	LP KELAS IIA BALIKPAPAN	0	0	0
2	LP KELAS IIA SAMARINDA	0	0	0
3	LP KELAS IIA TARAKAN	180	180	178
4	LP KELAS IIA TENGGARONG	0	0	0
5	LP KELAS IIA BONTANG	120	120	30
6	LP KELAS IIB NUNUKAN	0	0	0
7	LP NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA	0	0	0
8	LPP KELAS II TENGGARONG	47	47	47
9	LPKA KELAS II TENGGARONG	0	0	0

10	RUTAN KELAS I SAMARINDA	469	288	288
11	RUTAN KELAS IIB BALIKPAPAN	103	103	103
12	RUTAN KELAS IIB TANAH GROGOT	18	18	18
13	RUTAN KELAS IIB TANJUNG REDEB	29	29	0
Jumlah		966	785	664

Perhitungan Kinerja Penurunan Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Bantuan Hukum

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja
Terwujudnya Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai Standar	Persentase tahanan yang memperoleh layanan bantuan hukum	80 %	84.58%

1) Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan napi resiko tinggi

a. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian

narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian Tahun 2024

WBP Resiko Tinggi	Jumlah Pembinaan Kepribadian Predikat Nilai Baik Non Resiko Tinggi	Jumlah Yang Berpredikat Baik
165	165	67

Perhitungan Kinerja Penurunan Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja
Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	65 %	40.6%

b. Persentase narapidana yang mendapatkan remisi

Jenis	Jumlah yang diusulkan	Yang memperoleh remisi
Remisi	8831	8831

Perhitungan Kinerja persentase narapidana yang mendapatkan remisi

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja
Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang mendapatkan remisi	98 %	100%

c. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi Tahun 2024

Jumlah WBP	Program Integrasi
12.615	9.939

d. Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan

Jumlah WBP	Napi mendapat pendidikan	Persentase
12.615	57	57

Perhitungan Kinerja persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	80 %	100%	125%

e. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar patuh dan disiplin

Jumlah WBP	Napi Kategori Resiko tinggi	Napi RT yang berubah perilaku
12615	0	0

Untuk Kalimantan Timur pada tahun 2024 berjumlah 67 orang Warga Binaan dan sudah dalam penanganan dan pengawasan.

f. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

Jumlah WBP	Napi yang dilatih	Napi yang bersertifikat
12615	508	448

g. Jumlah Narapidana yang bekerja dan produktif

Jumlah WBP	Napi yang dilatih	Napi yang bersertifikat
12615	210	170

Perhitungan Kinerja persentase narapidana yang bekerja dan produktif

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67 %	80.95%	120.82%

h. Presentase jumlah narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi

Jumlah WBP	Target	Napi yang mengikuti pendidikan Tinggi
12.615	Nihil	Nihil

Jika yang dimaksud dengan pendidikan adalah pada tingkatan universitas (S1, S2) maka untuk wilayah Kalimantan Timur sendiri belum dapat dilaksanakan (**NIHIL**)

2) Meningkatkan pelayanan pengelolaan Basan / Baran di wilayah sesuai standar

a. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitasnya

UPT	Jumlah Basan Baran		Jumlah Basan Baran Yang Terjaga Kualitasnya	Taget Capaian Persentase (%)
Rupbasan Kelas I Samarinda	Gudang Umum Terbuka	16219	32480	100 %
	Gudang Umum Tertutup	16261		

Perhitungan Kinerja Penurunan Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya pelayanan pengelolaan Basan / Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitasnya	70 %	100%	100%

b. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

UPT	Jmlh Basan Baran yang akan dikeluarkan berkekuatan hukum tetap	Yang dieksekusi	Persentase (%)
Rupbasan Kelas I Samarinda	59 Unit	59 Unit	100 %

Perhitungan Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja
Meningkatnya pelayanan pengelolaan Basan / Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	60	100 %

3) Meningkatkan pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien PAS dan pemenuhan pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar

a. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan diluar lembaga

Jenis	Jumlah Klien Integrasi	Yang Produktif
Klien Dewasa dan Klien Anak	7234	6692

Perhitungan Kinerja persentase narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60 %	0 %	0%

a. Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya

Jenis	Jumlah	Yang mengikuti pendidikan	Persentase
Klien Anak	74	74	100 %

Perhitungan Kinerja persentase anak yang terpenuhi hak pendidikannya

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	persentase narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi	30 %	100%	333.33%

1. Meningkatnya pemenuhan Hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar
- a. Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan ketrampilan dan bersertifikat

Jumlah Anak Binaan	Yang ikut pendidikan bersertifikat	Persentase
74	74	100 %

Perhitungan Kinerja Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan ketrampilan dan bersertifikat

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan ketrampilan dan bersertifikat	75 %	100%	133.33

- b. Persentase anak yang memperoleh hak integrasi

Jumlah Anak Binaan	Anak yang memenuhi syarat Hak Integrasi	Yang mendapat hak Integrasi	Persentase
74	74	74	100 %

Perhitungan Kinerja persentase anak yang memperoleh hak integrasi

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100 %	100%	100%

- c. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal

Jumlah Anak Binaan	Pendidikan Formal	Non formal	Persentase
74	74	74	100 %

Keterangan Data diatas, bahwa jumlah anak binaan dalam tahun 2024 sebanyak 74 Orang, Keseluruhan mengikuti kegiatan pendidikan formal dan non formal.

Perhitungan Kinerja persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80 %	100%	125%

2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan PAS dibidang Keamanan dan ketertiban

a. Persentase pengaduan yang diselesaikan

Jumlah WBP	Jumlah Pengaduan	Pengaduan yang diselesaikan	Persentase
12.615	4	4	100%

Perhitungan Persentase pengaduan yang diselesaikan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan PAS dibidang keamanan dan ketertiban	Persentase Persentase pengaduan yang diselesaikan	80 %	100%	125%

b. Persentase pencegahan gangguan kamtib

Jumlah WBP	Jumlah Gangguan Kamtib	Jumlah Pencegahan gangguan Kamtib	Persentase
12.615	106	106	100%

Perhitungan Persentase pengaduan yang diselesaikan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan PAS dibidang kamtib	Persentase pencegahan gangguan kamtib	70 %	100%	142.85%

c. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / narapidana / anak pelaku gangguan kamtib

Jumlah WBP	Jumlah Pelaku Gangguan Kamtib	Jumlah Kepatuhan Pelaku pelanggar Kamtib	Persentase
12.615	106	106	100%

Perhitungan Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / narapidana / anak pelaku gangguan kamtib

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan PAS dibidang keamanan dan ketertiban	kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / narapidana / anak pelaku gangguan kamtib	80 %	100%	125%

d. Persentase pemulihan kondisi gangguna kamtib secara tuntas

Jumlah WBP	Jumlah Pelaku Yang Patuh	Jumlah Pemulihan kondisi Gamtib	Persentase
12.615	106	106	100%

Perhitungan Persentase pemulihan kondisi gangguan kamtib secara tuntas

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan PAS dibidang keamanan dan ketertiban	Persentase pemulihan kondisi gangguna kamtib secara tuntas	80 %	100%	125%

3. Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar.

a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Jumlah WBP	Jumlah Pengaduan	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti	Persentase
12.615	4	4	100 %

Perhitungan Persentase pemulihan kondisi gangguan kamtib secara tuntas

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya penyelenggaraan PAS dibidang keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	80 %	100%	125%

b. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

Jumlah WBP	Jumlah Gangguan Kamtib	Jumlah Gamtib yang dapat dicegah	Persentase
12.615	106	106	100 %

Perhitungan Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya penyelenggaraan PAS dibidang keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80 %	100%	125%

c. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap pelanggaran Tatib Napi / Tah / Anak

Jumlah WBP	Jumlah Pelanggaran Tatib	Jumlah Kepatuhan dan Disiplin	Persentase
12.615	43	43	100 %

Perhitungan Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap pelanggaran Tata tertib Narapidana/Tahanan/Anak

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya penyelenggaraan PAS dibidang keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80 %	100%	125%

d. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

Jmlh WBP	Jmlh Gangguan Kamtib	Jmlh Gamtib yang dapat dicegah	Persentase
12.615	22	22	100 %

Perhitungan Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya penyelenggaraan PAS dibidang keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70 %	100%	142%

SASARAN KEGIATAN 3

Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan

Indikator Kinerja : Persentase Penegakan Hukum Pro Yustitia di Kewilayahan yang ditangani

Pada tahun 2024, seluruh satuan kerja di wilayah Kalimantan Timur dan Utara telah berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia sebanyak 4 (empat) kasus dengan rincian sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Nama Tersangka	Kewarganegaraan	Pasal Pelanggaran	Tahapan
1	Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur dan Utara	NIHIL			
2	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda	Jumha Alnasr	Suriah	122 Huruf (a) UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	P21
		Diah Binti Mukhlis	Indonesia	124 Huruf (b) UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	P21
3	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan	NIHIL			
4	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan	NIHIL			
5	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan	Muhammad Rizuan bin Hamdan	Malaysia	Pasal 113 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Tahap II P-21
		Mohammad Fahturahman bin Ondah	Malaysia	Pasal 113 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Tahap II P-21
6	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tanjung Redeb	NIHIL			

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditindaklanjuti di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{4}{4} \times 100\%$$

$$x = 100 \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Pro Yustisia}}{\text{Target persentase penegakan hukum Pro Yustisia}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100 \%}{90\%} \times 100\%$$

$$y = 111,11\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 111,11%.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Optimalnya penegakan hukum keimigrasian di kewilayahan	Persentase Penegakan Hukum Pro Justitia di Kewilayahan Yang Ditangani	90%	111.11%	123.45%

Tabel diatas menunjukkan belum tercapainya indikator tersebut dikarenakan belum adanya pro Yustitia yang dilakukan. Sasaran Kegiatan dan Indikator diatas baru muncul pada tahun 2024 karena penyesuaian dengan perubahan Renstra Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2024.

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja yang baru tersebut menekankan pada mengoptimalkan kinerja penegakan hukum dalam rangka pengamanan negara terhadap WNA yang berada dan berkegiatan diwilayah Kalimantan Timur dan Utara.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penegakan Hukum Pro Justitia di Kewilayahan Yang Ditangani	-	-	-	90%	111.11 %	123.4 5%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penegakan Hukum Pro Justitia di Kewilayahan Yang Ditangani	0	0	0	0	90 %

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional

Penyebab Keberhasilan

Pencapaian target persentase wilayah Kalimantan Timur dan Utara secara keseluruhan berdasarkan 6 (enam) satuan kerja yang memiliki target penegakan Hukum Pro Yustisia adalah sebesar 33,33% dengan rincian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda sebesar 111,11% dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan sebesar 111,11%. Satuan kerja yang tidak terdapat capaian Pro Yustisia terdiri dari Divisi Keimigrasian Kalimantan Timur, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, dan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tanjung Redeb. Capaian target penegakan Hukum Pro Yustisia dibandingkan tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan dikarenakan adanya optimalisasi kegiatan Operasi Mandiri, Operasi Gabungan Jagratara dan Penyelidikan Intelijen di wilayah Kalimantan Timur dan Utara. Tugas dan fungsi bindalwasnis Divisi Keimigrasian telah mendukung tercapainya target dibawah wilayah kerja Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Utara.

Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani

a) Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani

Pada tahun 2024, seluruh satuan kerja di wilayah Kalimantan Timur dan Utara berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran Administratif Keimigrasian sebanyak 110 (seratus sepuluh) dengan rincian sebagai berikut:

Satuan Kerja	Depor tasi	Depor Tasi dan Usulan Penangkalan	Keharusan Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal	Larangan Untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	Pengenaan Biaya Beban	Jumlah
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda	14	-	-	-	-	-	14
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan	7	4	7	-	-	-	18
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan	3	3	11	-	-	-	17
Kantor Imigrasi	35	-	2	-	6	-	43

Kelas II TPI Nunukan							
Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tanjung Redeb	4	-	-	-	-	-	4
Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan	7	7	-				14
Total	70	14	20	-	6	-	110

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{110}{110} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian}}{\text{Target persentase penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

$$y = 111,11\%$$

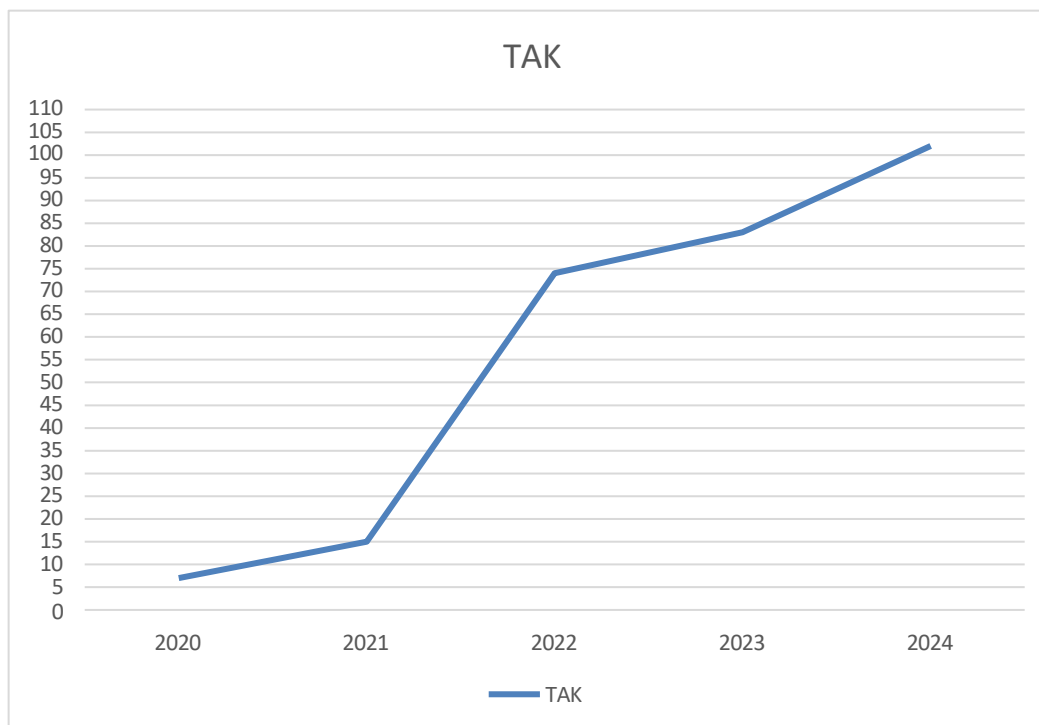
Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 111,11%.

b) **Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani 2020-2024**

Tahun	Pelanggaran Administratif yang ditangani	Pelanggaran Administratif yang ditindaklanjuti	Capaian
2020	7	7	111,11%
2021	15	15	111,11%
2022	74	74	111,11%
2023	83	83	111,11%

2024	102	102	111,11%
------	-----	-----	---------

Seluruh satuan kerja di wilayah Kalimantan Timur dan Utara telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran administratif keimigrasian pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:



c) **Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani adalah sebesar 90%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 111,11%.

d) **Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan standar nasional.**

Target capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 111,11%.

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Perbandingan Capaian TAK

Jumlah TAK yang ditangani	Jumlah TAK yang ditindaklanjuti	Jumlah Wilayah yang menangani TAK	Rata-Rata Capaian TAK Satuan Kerja	Capaian TAK [Rata-Rata Satuan Kerja Kaltim]
110	110	33	111,11%	111,11%

$$z = \frac{\text{Capaian persentase penegakan TAK}}{\text{Rata – rata capaian persentase penegakan TAK Satuan Kerja}} \times 100\%$$

$$z = \frac{111,11\%}{111,11\%} \times 100\%$$

$$z = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, wilayah Kalimantan Timur dan Utara telah memenuhi rata-rata capaian Tindakan Administratif Keimigrasian sebesar 100% dari rata-rata wilayah seluruh Indonesia.

Penyebab keberhasilan indikator kinerja kegiatan persentase tindakan administratif keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dikarenakan:

1. Pelatihan intelijen bagi pegawai pada subseksi intelijen telah terlaksana sehingga diharapkan pelatihan tersebut dapat menambah pengetahuan dan kemampuan pegawai dalam melaksanakan pengawasan terhadap orang asing.
2. Adanya tambahan pegawai pada subseksi intelijen mengakibatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan semakin baik.
3. Telah tersedianya media pelaporan orang asing sehingga memudahkan masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait keberadaan orang asing.
4. Adanya TIM PORA dalam rangka sharing informasi serta memberi pemahaman petugas terkait pengumpulan informasi dan data keberadaan Orang Asing secara berjenjang dan tingkat desa atau Kelurahan sampai dengan tingkat Provinsi.

a. Sasaran Kinerja Kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan

Indikator: Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima

a) Capaian Indikator Kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima

Pada tahun 2024, seluruh satuan kerja di wilayah Kalimantan Timur dan Utara telah melaksanakan layanan keimigrasian dengan melakukan pelayanan baik terkait layanan lalu lintas keimigrasian maupun izin tinggal keimigrasian sebanyak 102.958 layanan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diterima	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diselesaikan
1	Pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)	96.723	96.723
2	Pelayanan Izin Tinggal (perpanjangan, alih status dan perubahan data)	6.149	6.149
3	Pelayanan Affidavit	84	84
4	Pelayanan SKIM	2	2
Total		102.958	102.958

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Total permohonan layanan yang diterima}} \times 100\%$$

$$x = \frac{102.958}{102.958} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Rasio Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Target Rasio Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

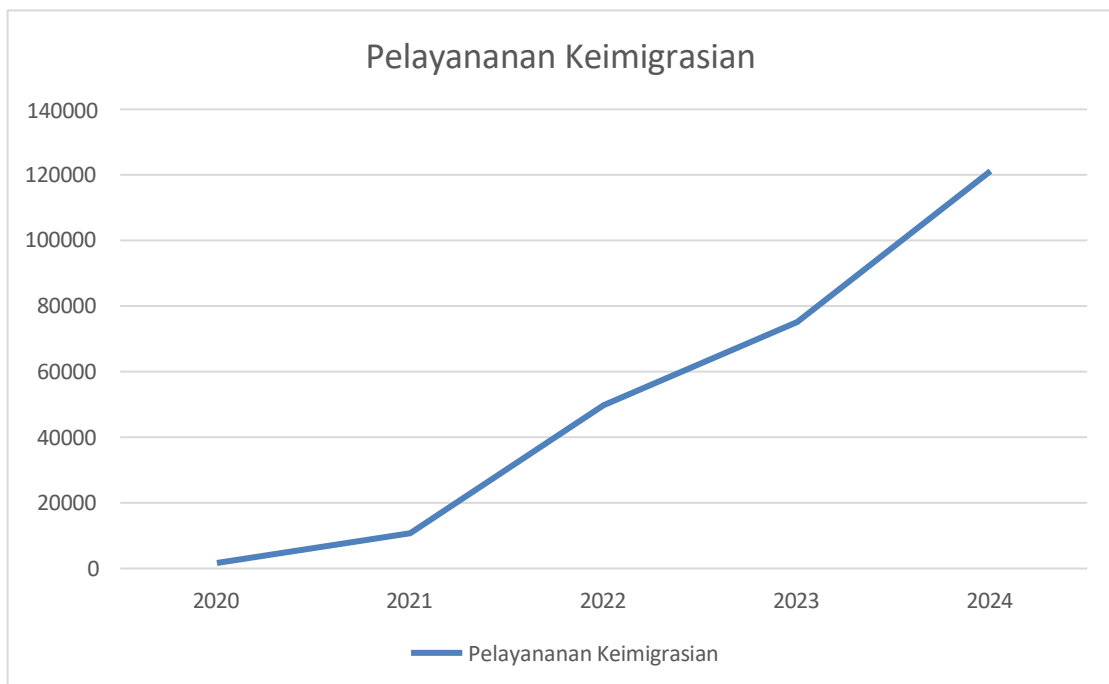
$$y = 111,11\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 111,11%.

b) Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima pada periode 2020-2024

Seluruh satuan kerja di wilayah Kalimantan Timur dan Utara telah melakukan Layanan Keimigrasian di kewilayahan pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Layanan Keimigrasian yang diterima	Layanan Keimigrasian yang diselesaikan	Capaian
2020	16.980	16.980	111,11%
2021	10.803	10.803	111,11%
2022	49.745	49.745	111,11%
2023	75.178	75.178	111,11%
2024	121.666	121.666	111,11%



- c) **Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima adalah sebesar 90%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 111,11%.

- d) **Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan standar nasional.**

Target capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 111,11%.

Perbandingan Capaian Layanan Keimigrasian Wilayah				
Jumlah Layanan Keimigrasian diterima	Jumlah Layanan Keimigrasian diselesaikan	Jumlah Wilayah yang melakukan Layanan Keimigrasian	Rata-Rata Capaian Layanan Keimigrasian Wilayah	Capaian Layanan Keimigrasian Wilayah
102.958	102.958	126	111,11%	111,11%

$$z = \frac{\text{Capaian rasio layanan keimigrasian}}{\text{Rata - rata capaian rasio layanan keimigrasian}} \times 100\%$$

$$z = \frac{111,11\%}{111,11\%} \times 100\%$$

$$z = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, wilayah Kalimantan Timur dan Utara telah mencaapai rata-rata capaian rasio layanan keimigrasian hingga 111,11% dari rata-rata wilayah di seluruh Indonesia.

e) **Analisis keberhasilan pencapaian target Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima**

Keberhasilan indikator kinerja rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dikarenakan:

- Melaporkan segala permasalahan dan berkoordinasi dengan Direktorat Sistik terkait upgrade pembaharuan pada aplikasi M-Paspor sehingga dapat meminimalisir terjadinya keterlambatan dalam proses pelayanan.
- Telah terlaksananya inovasi-inovasi Direktorat Jenderal Imigrasi yang dapat mempermudah dan mempercepat akses dalam melayani baik WNI maupun WNA seperti pelaksanaan Mobile Paspor (M-Paspor), Visa Onshore Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2021, pemberlakuan bebas visa kunjungan terhadap 9 (sembilan) negara ASEAN berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0549.GR.01.01 tanggal 05 April 2022, penerapan Second-Home Visa berdasarkan Surat Edaran Nomor IMI-0740.GR.01.01 Tahun 2022 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua, penerapan masa berlaku paspor 10 tahun yang dimulai pada 12 Oktober 2022 dari yang sebelumnya hanya 5 tahun berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2022 Pasal 2A ayat 2 penerapan masa berlaku paspor 10 tahun dari yang sebelumnya hanya 5 tahun, implementasi pembayaran visa dari luar negeri menggunakan kartu kredit berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.02/2022 yang diwujudkan dalam bentuk visa kunjungan saat kedatangan elektronik (e-VOA), peluncuran e-Visa on Arrival pada tanggal 04 November 2022 melalui website molina.imigrasi.go.id, peluncuran golden visa serta peluncuran program layanan Eazy Passport.
- Rasio layanan keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian di kewilayahan yang diterima mengalami peningkatan sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 dan ini membuktikan bahwa pelayanan bagi WNI maupun WNA pada Kantor Imigrasi telah berjalan dengan baik.
- Alternatif solusi yang dilakukan demi tercapainya target rasio layanan keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian

di kewilayahan yang diterima adalah dengan melakukan pengembangan kompetensi secara berkala dengan menunjuk pegawai yang kompeten untuk mengikuti diklat pelayanan publik serta memberikan arahan dan bimbingan kepada pegawai pada seksi Lantaskim dan seksi Intaltuskim untuk secara terus menerus mengupdate pengetahuan terkait aturan-aturan terbaru terkait keimigrasian dan SOP terkait pelayanan publik.

Rekomendasi peningkatan rasio layanan keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian di kewilayahan yang diterima:

1. Percepatan proses penerbitan Izin Tinggal Online yang awalnya dari kantor imigrasi membutuhkan persetujuan kantor wilayah dulu, sekarang dari kantor imigrasi langsung hanya membutuhkan persetujuan dari pusat
2. Peningkatan dalam inovasi-inovasi pemenuhan layanan keimigrasian yang dibuat oleh Kantor Imigrasi.
3. Melakukan pelatihan budaya pelayanan prima terhadap petugas layanan secara berkala.
4. Mengoptimalkan penyebaran informasi melalui banner, media sosial, website, cetak, dan elektronik terkait pelayanan keimigrasian.
5. Merespon pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat agar keluhan-keluhan terhadap pelayanan keimigrasian dapat segera ditindaklanjuti.
6. Menerapkan pemberian reward dan punishment bagi petugas layanan setiap triwulan sehingga petugas dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

b. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

1. Indikator 1: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

a) Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Pada tahun 2024, wilayah Kalimantan Timur dan Utara telah melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan rincian sebagai berikut:

Triwulan I s.d IV

No.	Satuan Kerja	Capaian
1	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda	100%
2	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan	100%
3	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan	100%
4	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan	100%
5	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tanjung Redeb	100%
6	Rumah Detensi Imigrasi	100%
Rata-rata capaian		100%

Berdasarkan data seluruh satuan kerja imigrasi yang telah yang dihimpun, diperoleh jumlah rencana aksi yang terselesaikan di seluruh satuan kerja di wilayah Kalimantan Timur dan Utara tanpa terkecuali adalah sebanyak 28 kegiatan dari total 28 kegiatan rencana aksi.

Pengukuran Kinerja:

% Pelaksanaan Ren. Aksi RB

$$= \frac{\text{Jumlah Rencana aksi RB satker Ditjen Imigrasi yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB satker Ditjen Imigrasi}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{28}{28} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada wilayah Kalimantan Timur dan Utara dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 100%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada wilayah Kalimantan Timur dan Utara sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$y = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada wilayah Kalimantan Timur dan Utara dengan capaian 100%.

b) Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada periode 2023-2024

Seluruh satuan kerja di wilayah Kalimantan Timur dan Utara telah melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi pada periode 2023 - 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Rencana Aksi RB	Jumlah Rencana Aksi yang Terselesaikan	Capaian
2023	28	28	100%
2024	28	28	100%

c) Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi adalah sebesar 100%. Target tersebut telah sesuai dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

d) Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan standar nasional.

Target capaian Rasio Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi sebesar 100% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 100%.

Capaian Wilayah	Rata-rata Kemenkumham
100%	100%

$$z = \frac{\text{Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Rata – rata capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$z = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$z = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, seluruh satuan kerja di wilayah Kalimantan Timur dan Utara telah sesuai rata-rata capaian penyelesaian rencana aksi RB hingga 100% dari rata-rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

e) Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Keberhasilan pencapaian target dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain:

- Tingkat Pelaksanaan Rencana Aksi telah disusun dan dilaksanakan dengan baik.
- Peningkatan Kinerja dan Efisiensi terhadap efisiensi waktu, sumber daya, dan biaya dalam pelaksanaan tugas.
- Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh UPT Imigrasi.
- Proses pengelolaan dan pelaporan kegiatan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

- Penyusunan Rencana Aksi yang Terukur dan Realistis: Menyusun rencana aksi yang jelas dengan indikator yang terukur serta tenggat waktu yang realistis.
- Peningkatan Sistem Pelayanan: Meningkatkan pelayanan publik dengan penerapan teknologi, seperti e-Government dan sistem antrian berbasis online.
- Sosialisasi dan Pembinaan Internal: Memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai mengenai pentingnya reformasi birokrasi dan melibatkan mereka dalam pelaksanaan perubahan.
- Monitoring dan Evaluasi Rutin: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi dan menyusun laporan perkembangan secara transparan.

2. Indikator 2: Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan

a) Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan

Pada tahun 2024, seluruh satuan kerja di wilayah Kalimantan Timur dan Utara telah melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan oleh Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham dengan hasil sebagai berikut:

Satuan Kerja	Indeks Layanan Kesekretariatan
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda	3,95
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan	3,92
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan	3,98
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan	3,99
Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tanjung Redeb	3,95
Rumah Detensi Imigrasi	3,88
Rata-rata	3,95

Berdasarkan perolehan nilai di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada wilayah Kalimantan Timur dan Utara dengan capaian 3,95.

Perolehan nilai tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 3,1. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di Lingkup UPT Imigrasi pada wilayah Kalimantan Timur dan Utara sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}}{\text{Target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{3,95}{3,1} \times 100\%$$

$$y = 127,42\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada wilayah Kalimantan Timur dan Utara dengan capaian 127,42%.

b) Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada periode 2020-2024

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur dan Utara telah melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan. Namun dikarenakan indikator ini merupakan indikator pada Renstra perubahan dan pengukurannya baru dilaksanakan pada tahun 2024, maka **perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan.**

Capaian Wilayah	Rata-rata Kemenkumham
100%	100%

c) Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal

Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan adalah sebesar 3,1. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 127,42%.

d) Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan standar nasional.

Target capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 3,1 merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 127,42%.

Capaian [Wilayah Kalimantan Timur dan Utara	Rata-rata Kemenkumham
127,42%	100%

$$z = \frac{\text{Capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}}{\text{Rata – rata capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$z = \frac{3,95}{3,1} \times 100\%$$

$$z = 127,42\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, wilayah Kalimantan Timur dan Utara telah dapat melampaui rata-rata capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan hingga 127,42% dari rata-rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

e) Analisis keberhasilan pencapaian target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di kewilayahan yang diterima

Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi tingkat kepuasan adalah:

- Sumber Daya Manusia: Kualitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh keterampilan, pengetahuan, dan sikap petugas kesekretariatan.
- Sistem dan Prosedur Administrasi: Proses yang efisien dan transparan akan meningkatkan kepuasan. Jika prosedur administrasi terlalu rumit atau memakan waktu lama, hal ini dapat menurunkan kepuasan.
- Fasilitas Pendukung: Sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang kerja yang nyaman, perangkat IT yang baik, dan akses terhadap informasi yang mudah, juga turut mendukung kelancaran layanan.
- Keterlibatan Stakeholder: Komunikasi dan koordinasi antara kesekretariatan dengan unit kerja di kewilayahan juga berperan besar dalam memberikan layanan yang memuaskan.

SASARAN KEGIATAN 4

Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah

Indikator Kinerja : Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	80%	96.60%	120.75%

Selama tahun anggaran 2024, telah diselesaikan harmonisasi rancangan peraturan daerah sebanyak 484 raperda/raperkada dari 501 permohonan harmonisasi yang diterima.

Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham:

$$= \frac{\text{jumlah fasilitasi perancangan perda}}{\text{permohonan fasilitasi perancangan perda}} \times 100\%$$
$$= \frac{484}{501} \times 100\% = 96.60\%$$

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	80%	44%	55%	80%	96.60%	120.75%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	15 raperda	80%	80%	80%	80%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja kantor wilayah tersebut tidak terlepas dari peran seluruh jajaran Pegawai, anggaran yang tersedia, sarana prasarana serta komitmen dalam mendukung dan mewujudkan layanan internal yang optimal di kantor wilayah Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN 5

Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan

Indikator Kinerja : Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	11 Orang	11 Orang	100%

Kegiatan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan dengan mengundang narasumber dari ditjen PP dan peserta dari JF Perancang Kantor Wilayah dan JF Perancang Pemerintah Daerah

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	11 Orang	11 Orang	100%	11 Orang	11 Orang	100%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	14 orang	14 orang	14 orang	11 orang	11 orang

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja kantor wilayah tersebut tidak terlepas dari peran seluruh jajaran Pegawai, anggaran yang tersedia, sarana prasarana serta komitmen dalam mendukung dan mewujudkan layanan internal yang optimal di kantor wilayah Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN 6

Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah

Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di wilayah	Naik 6% dari tahun sebelumnya	-11.30%	-188.33%

Penerimaan PNBP Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0.69 % (Rp. 10.917.050.000,-) dari penerimaan PNBP tahun 2023 (Rp. 14.801.000.000,-).

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	2.72%	54.4%	Naik 6% dari tahun sebelumnya	-11.30%	-188.33%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	-	5%	5%	5%	Naik 6% dari tahun sebelumnya

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional

Penyebab Tidak Tercapai Target Kinerja

1. Terdapat opsi lain dalam mitigasi resiko pembiayaan selain jaminan fidusia bagi lembaga pembiayaan sebagaimana terdapat dalam pasal 26 Peraturan OJK No 35/POJK.05/2018. Sehingga lembaga pembiayaan cenderung memilih alternatif lain disamping jaminan fidusia.
2. Berdasarkan Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021, eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur, namun melalui bantuan pengadilan negeri sehingga lembaga pembiayaan memilih alternatif selain jaminan fidusia dalam mitigasi resiko pembiayaan.
3. Kebijakan pembukaan blokir perusahaan yang dikarenakan belum melaporkan pemilik manfaat perusahaan memakan waktu cukup lama, sehingga menghambat proses perubahan perusahaan.
4. Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mempengaruhi keputusan investasi, terutama oleh investor yang cenderung lebih hati-hati menunggu hasil pemilu untuk menilai kebijakan yang akan diambil oleh pemenang pemilu.

SASARAN KEGIATAN 7

Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah

Indikator Kinerja : Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di kantor wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kanwil	90%	96.22%	106.91%

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kanwil	86%	100%	119.04%	90%	96.22%	106.91%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	-	82%	84%	86%	90%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja kantor wilayah tersebut tidak terlepas dari peran seluruh jajaran Pegawai, anggaran yang tersedia, sarana prasarana serta komitmen dalam mendukung dan mewujudkan layanan internal yang optimal di kantor wilayah Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN 8

Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator Kinerja : Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya penegakan hukum kekayaan intelektual di wilayah	Persentase penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah	30%	100%	333.33%

Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual sebagai pelaksana Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah melaksanakan sebagian tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang telah disepakati dalam perjanjian kinerja. Kegiatan Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual selama periode tahun 2024 salah satunya berfokus pada penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah	106 Layan an			30%	100%	333.33%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah	105 jumlah permohonan	105 layanan	106 layanan	106 layanan	30%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja kantor wilayah tersebut tidak terlepas dari peran seluruh jajaran Pegawai, anggaran yang tersedia, sarana prasarana serta komitmen dalam mendukung dan mewujudkan layanan internal yang optimal di kantor wilayah Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN 9

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator Kinerja 1 : Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di wilayah	70%	70.72%	101.02 %

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di wilayah	-	-	-	70%	70.72%	101.02%

Indikator ini baru muncul pada tahun 2024 dikarenakan penyesuaian atas perubahan rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Masyarakat yang memahami kekayaan intelektual di wilayah	-	-	-	-	70%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja kantor wilayah tersebut tidak terlepas dari peran seluruh jajaran Pegawai, anggaran yang tersedia, sarana prasarana serta komitmen dalam mendukung dan mewujudkan layanan internal yang optimal di kantor wilayah Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN 9

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator Kinerja 2 : Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pemahaman Masyarakat terhadap kekayaan intelektual di wilayah	Persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual di wilayah	20%	50.46%	252.3%

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual di wilayah	-	-	-	20%	50.46%	252.3%

Indikator ini baru muncul pada tahun 2024 dikarenakan penyesuaian atas perubahan rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual di wilayah	-	-	-	-	20%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja kantor wilayah tersebut tidak terlepas dari peran seluruh jajaran Pegawai, anggaran yang tersedia, sarana prasarana serta komitmen dalam mendukung dan mewujudkan layanan internal yang optimal di kantor wilayah Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN 10

Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah

Indikator Kinerja : Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25%	78,72%	314%

jumlah anggota jdih yang dikelola sebanyak 37. jumlah anggota jdih di wilayah sebanyak 47.

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah anggota JDIHN yang dikelola}}{\text{Total anggota JDIHN di wilayah}} \times 100\% \\ &= \frac{37}{47} \times 100\% = 78,72\% \end{aligned}$$

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	-	-	-	25%	78,72%	314%

Indikator ini baru muncul pada tahun 2024 dikarenakan penyesuaian atas perubahan rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	-	-	-	-	25%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja kantor wilayah tersebut tidak terlepas dari peran seluruh jajaran Pegawai, anggaran yang tersedia, sarana prasarana serta komitmen dalam mendukung dan mewujudkan layanan internal yang optimal di kantor wilayah Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN 11

Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah

Indikator Kinerja 1 : Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82%		71,70%

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	77.56%	94,58%	82%	58,5%	71,70%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	165 orang	77%	81%	81%	82%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja kantor wilayah tersebut tidak terlepas dari peran seluruh jajaran Pegawai, anggaran yang tersedia, sarana prasarana serta komitmen dalam mendukung dan mewujudkan layanan internal yang optimal di kantor wilayah Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN 11

Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah

Indikator Kinerja 2 : Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	63,93%	79,91%

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi yang diberikan di kanwil}}{\text{total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi di kanwil}} \times 100\%$$
$$= \frac{63}{80} \times 100\% = 79\%$$

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	77,56%	94,58%	82%	58,5%	71,70%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	165 orang	77%	81%	81%	82%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja kantor wilayah tersebut tidak terlepas dari peran seluruh jajaran Pegawai, anggaran yang tersedia, sarana prasarana serta komitmen dalam mendukung dan mewujudkan layanan internal yang optimal di kantor wilayah Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN 12

Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah

Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	75%	107%

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	0	0	0	70%	75%	107%

Indikator tersebut diatas baru muncul pada Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibanding dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	-	-	-	-	70%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja kantor wilayah tersebut tidak terlepas dari peran seluruh jajaran Pegawai, anggaran yang tersedia, sarana prasarana serta komitmen dalam mendukung dan mewujudkan layanan internal yang optimal di kantor wilayah Tahun 2024.

SASARAN KEGIATAN 13

Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan Peraturan Daerah

Indikator Kinerja 1 : Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan mengangkat tema Peraturan Hukum Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 7 Tahun 2012 tentang pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang dilakukan	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Indikator tersebut diatas baru muncul pada Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibanding dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang dilakukan	-	-	-	-	1 Dokumen

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional

Penyebab Keberhasilan

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan mengangkat tema Peraturan Hukum Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 7 Tahun 2012 tentang pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

SASARAN KEGIATAN 13

Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan Peraturan Daerah

Indikator Kinerja 2 : Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Indikator tersebut diatas baru muncul pada Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibanding dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	-	-	-	-	1 Dokumen

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional

Penyebab Keberhasilan

terlaksananya inventarisasi dan monitoring evaluasi penyusunan perencanaan peraturan daerah pada pemerintah daerah.

SASARAN KEGIATAN 14

Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan

Indikator Kinerja 1 : Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%	75%	150%

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	0	0	0	50%	75%	150%

Indikator tersebut diatas baru muncul pada Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibanding dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Fasiltasi Perencanaan Peraturan Daerah	-	-	-	-	50%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja kantor wilayah tersebut tidak terlepas dari peran seluruh jajaran Pegawai, anggaran yang tersedia, sarana prasarana serta komitmen dalam mendukung dan mewujudkan layanan internal yang optimal di kantor wilayah Tahun 2024.

SASARAN KEGIATAN 14

Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan

Indikator Kinerja 2 : Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%	80%	320%

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	-	-	-	25%	80%	320%

Indikator tersebut diatas baru muncul pada Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibanding dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	-	-	-	-	25%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja kantor wilayah tersebut tidak terlepas dari peran seluruh jajaran Pegawai, anggaran yang tersedia, sarana prasarana serta komitmen dalam mendukung dan mewujudkan layanan internal yang optimal di kantor wilayah Tahun 2024.

SASARAN KEGIATAN 14

Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan

Indikator Kinerja 3 : Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%	80%	228%

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	-	-	-	35%	80%	228%

Indikator tersebut diatas baru muncul pada Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibanding dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	-	-	-	-	35%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja kantor wilayah tersebut tidak terlepas dari peran seluruh jajaran Pegawai, anggaran yang tersedia, sarana prasarana serta komitmen dalam mendukung dan mewujudkan layanan internal yang optimal di kantor wilayah Tahun 2024.

SASARAN KEGIATAN 14

Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan

Indikator Kinerja 4 : Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%	100%	133%

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	-	-	-	75%	100%	133%

Indikator tersebut diatas baru muncul pada Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibanding dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	-	-	-	-	75%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja kantor wilayah tersebut tidak terlepas dari peran seluruh jajaran Pegawai, anggaran yang tersedia, sarana prasarana serta komitmen dalam mendukung dan mewujudkan layanan internal yang optimal di kantor wilayah Tahun 2024.

SASARAN KEGIATAN 14

Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan

Indikator Kinerja 5 : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3.33%	16.93%	508.40%

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	-	-	-	3.33%	16.93%	508.40%

Indikator tersebut diatas baru muncul pada Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibanding dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	-	-	-	-	3.33%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja kantor wilayah tersebut tidak terlepas dari peran seluruh jajaran Pegawai, anggaran yang tersedia, sarana prasarana serta komitmen dalam mendukung dan mewujudkan layanan internal yang optimal di kantor wilayah Tahun 2024.

SASARAN KEGIATAN 15

Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berspektif HAM

Indikator Kinerja : Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya produk hukum daerah yang berspektif HAM	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%	90%	100%

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	-	-	-	90%	90%	100%

Indikator tersebut diatas baru muncul pada Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibanding dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	-	-	-	-	90%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja kantor wilayah tersebut tidak terlepas dari peran seluruh jajaran Pegawai, anggaran yang tersedia, sarana prasarana serta komitmen dalam mendukung dan mewujudkan layanan

internal yang optimal di kantor wilayah Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN 16

Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah

Indikator Kinerja : Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti	80%	100%	125%

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti	-	-	-	80%	100%	125%

Indikator tersebut diatas baru muncul pada Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibanding dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti	-	-	-	-	80%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja kantor wilayah tersebut tidak terlepas dari peran seluruh jajaran Pegawai, anggaran yang tersedia, sarana prasarana serta komitmen dalam mendukung dan mewujudkan layanan internal yang optimal di kantor wilayah Tahun 2024

B. Realisasi Anggaran

Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari 9 (sembilan) Petikan DIPA dari masing-masing unit Eselon I. Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur Tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur Tahun 2023 dan Tahun 2024

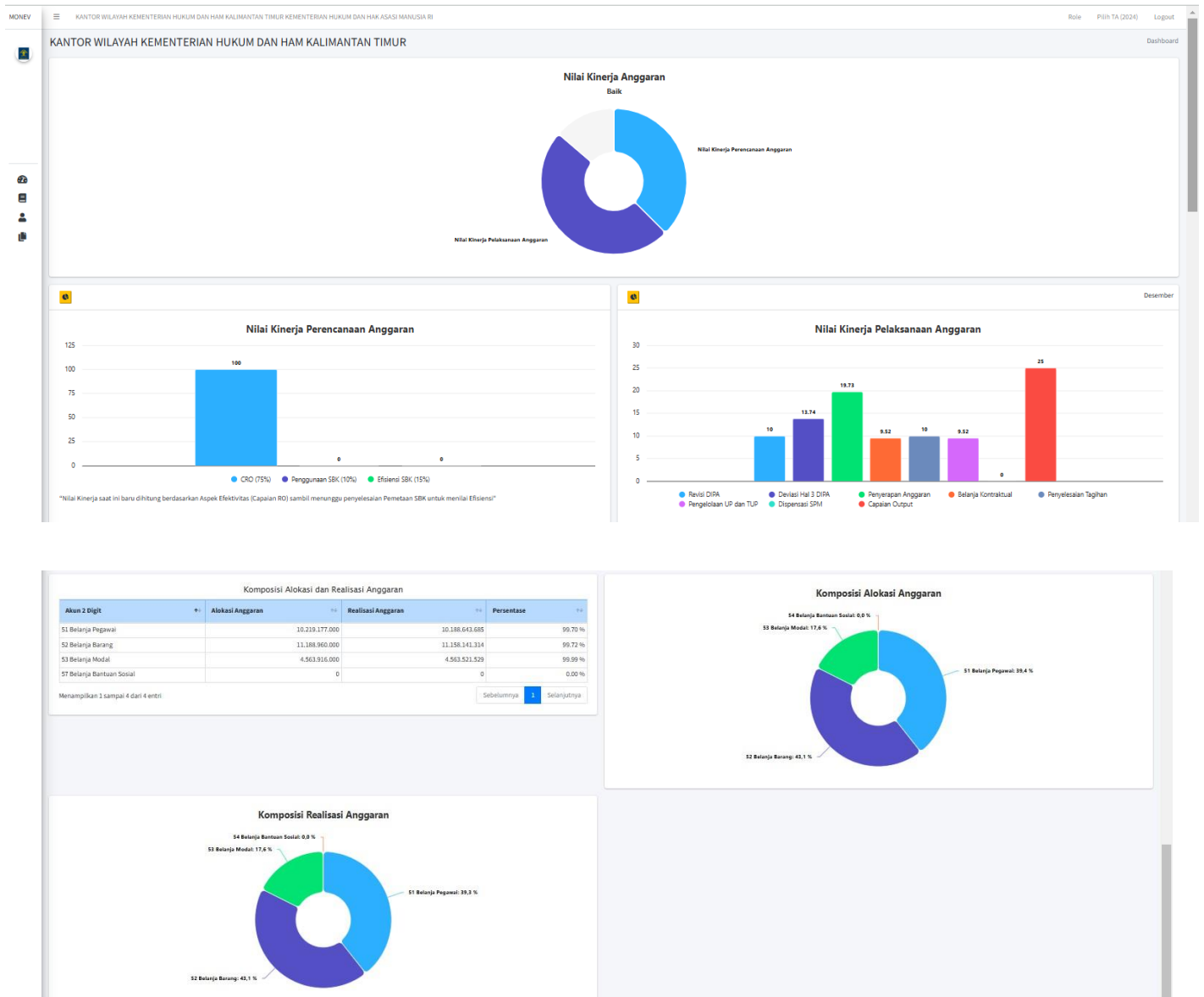
NO	PROGRAM ESELON 1	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SISA TOTAL (Rp)	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SISA TOTAL (Rp)
		2023					2024		
1	Program Dukungan Manajemen (Sekretariat Jenderal)	20,099,233,000	19,933,042,243	99.17%	166,190,757	25,972,053,000	25,910,306,528	99.76%	61,746,472
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum)	3,630,000,000	3,622,780,588	99.80%	7,219,412	5,859,270,000	5,833,893,542	99.57%	25,376,458
3	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)	748,098,000	747,010,483	99.85%	1,087,517	1,026,444,000	1,019,562,442	99.33%	6,881,558
4	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Keimigrasian)	1,753,598,000	1,736,955,368	99.05%	16,642,632	3,248,024,000	3,147,571,893	96.91%	100,452,107
5	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)	1,139,906,000	1,139,006,459	99.92%	899,541	1,489,616,000	1,489,107,140	99.97%	508,860
6	Program Pembentukan Regulasi (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)	343,000,000	342,995,713	100.00 %	4,287	493,000,000	492,985,307	100.00%	14,693
7	Program Pemajuan dan Penegakan HAM (Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia)	269,236,000	268,953,049	99.89%	282,951	407,486,000	407,453,738	99.99%	32,262
8	Program Pembentukan Regulasi (Badan Pembinaan Hukum Nasional)	2,200,543,000	2,193,965,178	99.70%	6,577,822	2,398,110,000	2,397,602,261	99.98%	507,739
9	Program Dukungan Manajemen (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)	207,976,000	204,353,300	98.26%	3,622,700	260,045,000	257,255,765	98.93%	2,789,235
JUMLAH		30.391.590.000	30.189.062.381	99.51%	202.527.619	41.154.048.000	40.955.738.616	99.34%	198.309.384

C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam mengukur kinerja anggaran yang telah dicapai oleh Kantor Wilayah Kalimantan Timur pada Tahun 2024, dapat diukur melalui beberapa capaian nilai diantaranya Capaian Nilai SMART, IKPA, dan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen (Sekretariat Jenderal)

Capaian SMART, IKPA dan Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen (Sekretariat Jenderal) Tahun 2024



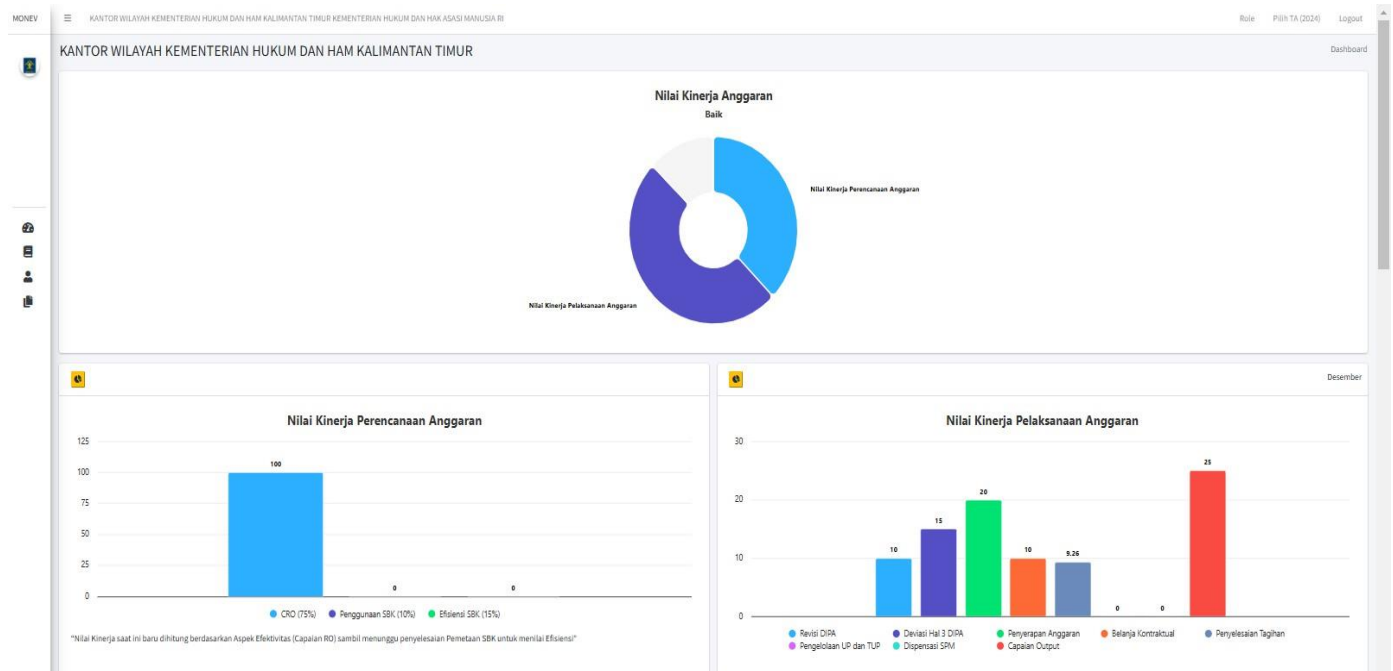
NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	046	013	408855	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	Nilai	100.00	91.60	98.64	95.20	100.00	95.19	100.00	97.51	100%	0.00	97.51
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.74	19.73	9.52	10.00	9.52	25.00				
					Nilai Aspek		95.80			97.26		100.00				

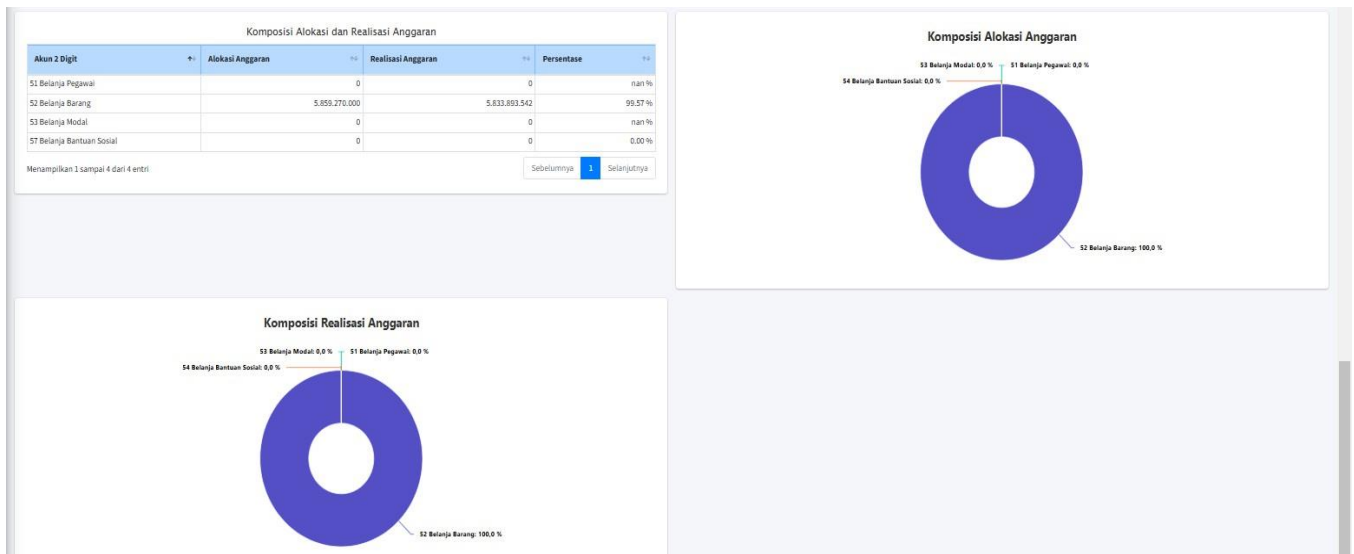
Pada Program Dukungan Manajemen (Sekretariat Jenderal) di Kantor Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2024 nilai Smart Kantor Wilayah Kalimantan Timur adalah sebesar 86,26 dan nilai IKPA sebesar 97,51.

Dengan jumlah alokasi Tahun 2024 sebesar Rp. 25.972.053.000- dapat direalisasikan Kantor Wilayah Kalimantan Timur sebesar Rp. 25.910.306.528 (99.76%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 61.746.472- dengan capaian anggaran tersebut mengindikasikan bahwa kinerja Kantor Wilayah Kalimantan Timur bisa dikatakan efektif dalam pelaksanaannya.

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum)

Capaian SMART, IKPA dan Realisasi Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) Tahun 2024





MONEVPA

halchat

KANWIL KEMENTER... T.A. 2024

Indikator Pelaksanaan Anggaran

EXCEL PDF FILTER

FILTER: SAMPAI DENGAN DESEMBER

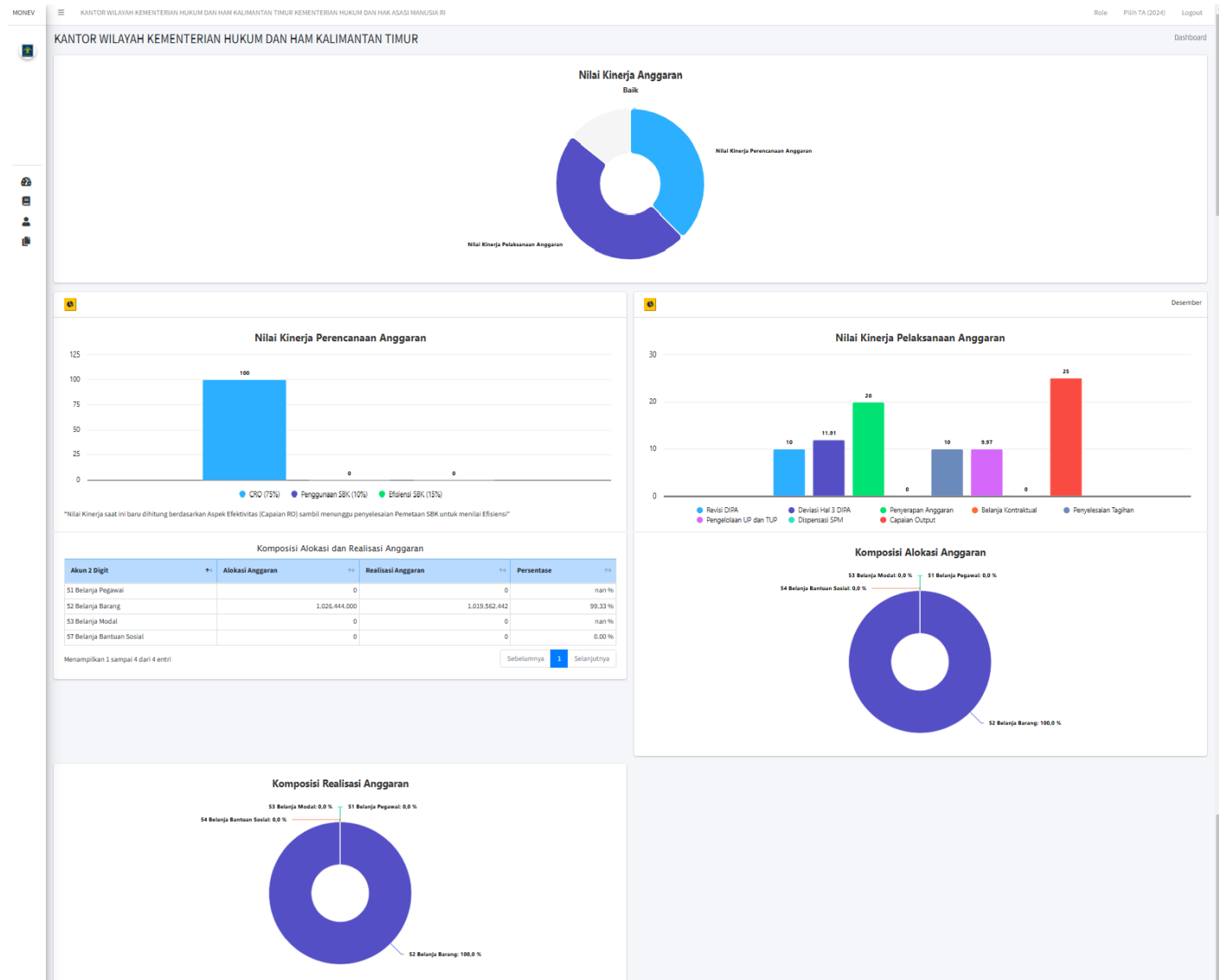
CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	046	013	408852	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	92.59	0.00	100.00	89.26	90%	0.00	99.18
					Bobot	10	15	20	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	9.26	0.00	25.00				
					Nilai Aspek		100.00			97.53		100.00				

Pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) di Kantor Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2024 nilai Smart Kantor Wilayah Kalimantan Timur adalah sebesar 87.09% dan nilai IKPA sebesar 99.18%

Dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 5.859.270.000,- tersebut dapat direalisasikan Kantor Wilayah Kalimantan Timur sebesar Rp. 5.833.893.542,- (99,57%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 25.376.458,-.

3. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) Capaian SMART, IKPA dan Realisasi Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) Tahun 2024



MONEVPA

kanwil KEMENTER... T.A. 2025

Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER: SAMPAI DENGAN | DESEMBER

CARI DI HALAMAN... Q

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	046	013	408853	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	Nilai	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	70%	0.00	14.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	50.00		0.00				0.00				

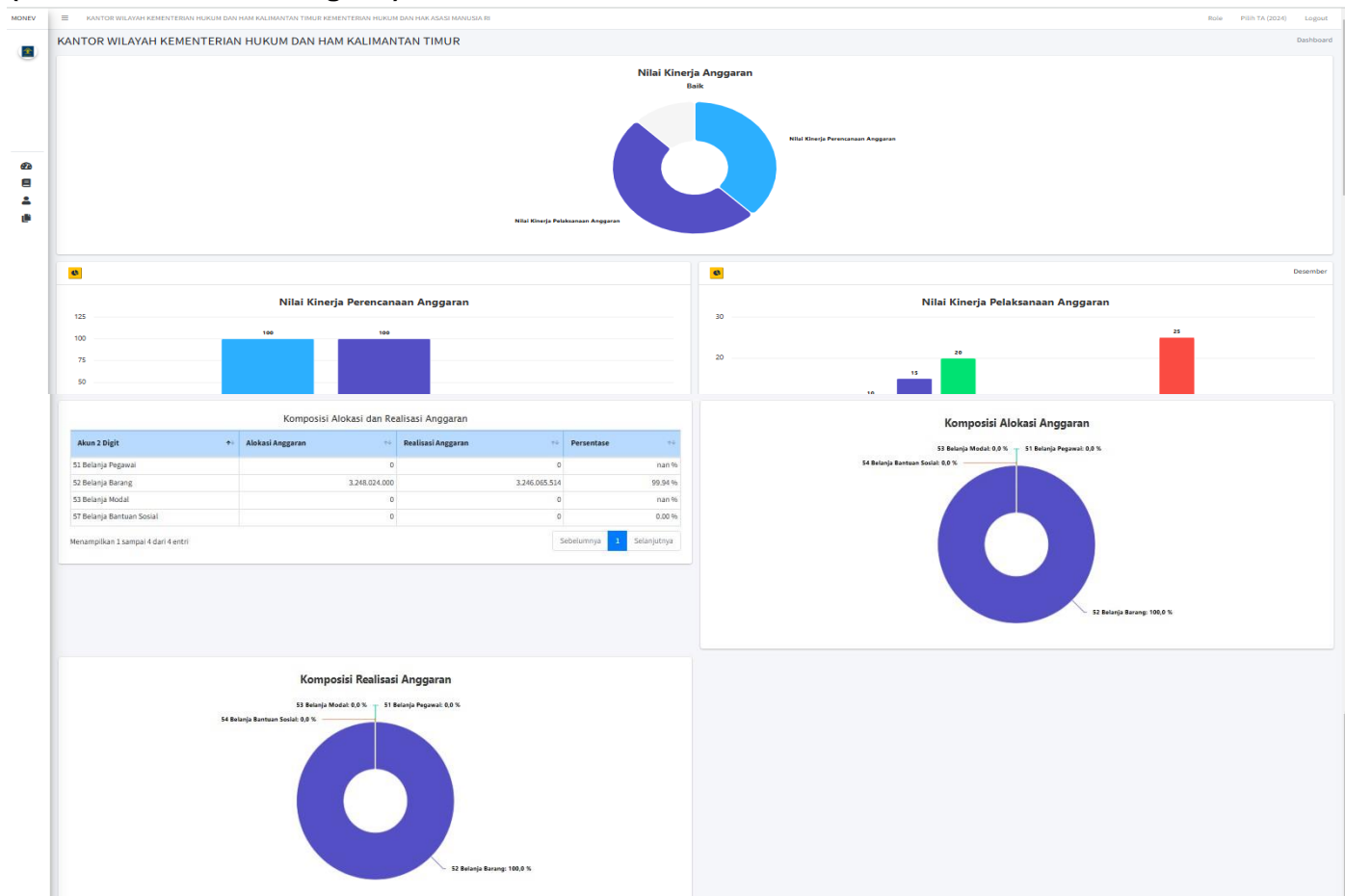
EXCEL PDF FILTER

Pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) di Kantor Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2024 nilai Smart Kantor Wilayah Kalimantan Timur adalah sebesar 85,77, dan nilai IKPA sebesar 14.29.

Dengan jumlah alokasi Tahun 2024 sebesar Rp. 1.026.444.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.019.562.442,- (99,33%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 6.881.558,-.

4. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Keimigrasian)

Capaian SMART, IKPA dan Realisasi Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Imigrasi) Tahun 2024



MONEVPA KANWIL KEMENTER... T.A. 2024

Indikator Pelaksanaan Anggaran

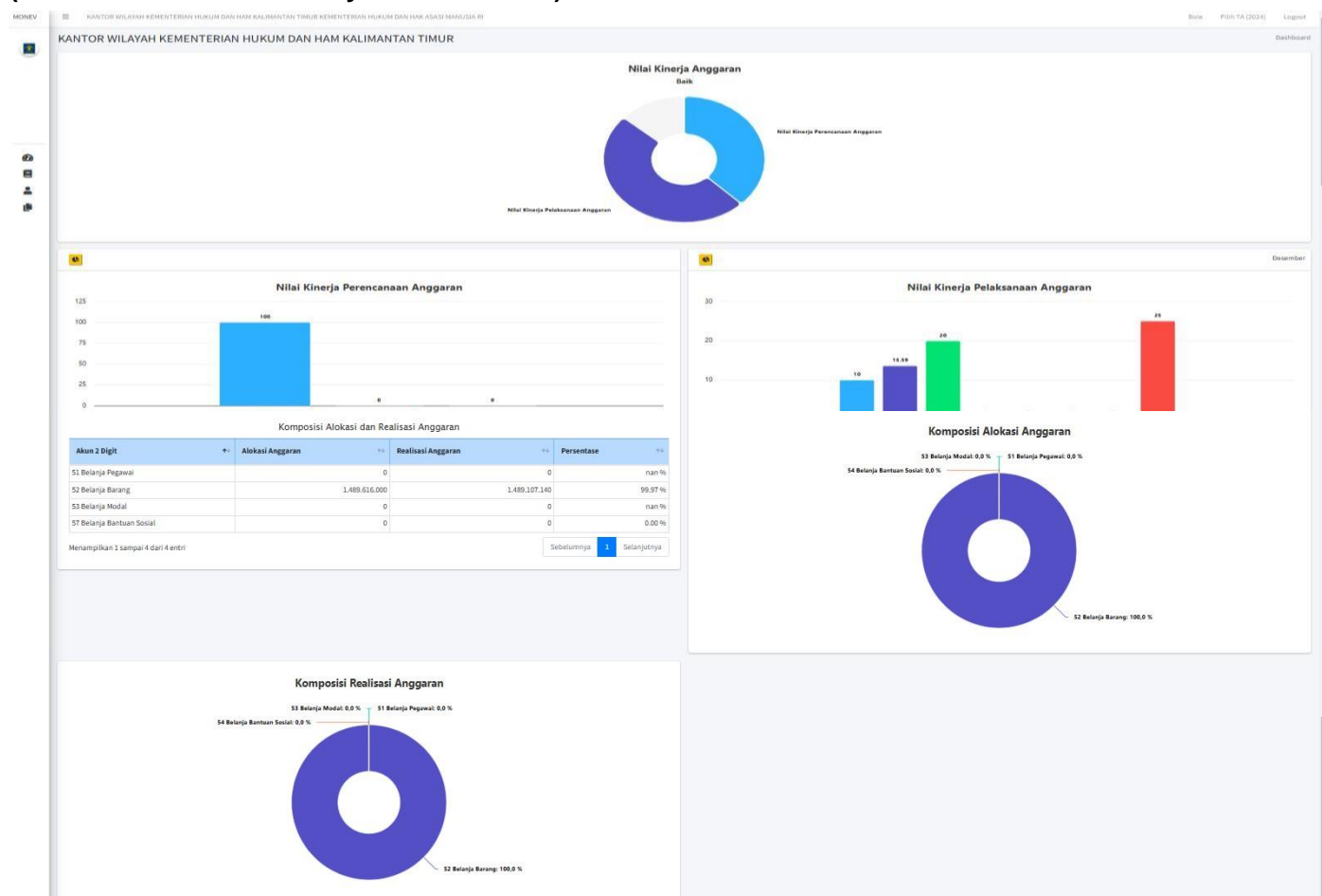
FILTER: SAMPAI DENGAN | DESEMBER CARI DI HALAMAN... Q

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	046	013	408854	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00			100.00			100.00				

Pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Keimigrasian) di Kantor Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2024 nilai Smart Kantor Wilayah Kalimantan Timur adalah sebesar 87,5 dan nilai IKPA sebesar 100.

Dengan jumlah alokasi Tahun 2024 sebesar Rp. 3.248.024.000,- dapat direalisasikan Kantor Wilayah Kalimantan Timur sebesar Rp. 3.246.065.514,- (99,94%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.958.486,-.

5. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) Capaian SMART, IKPA dan Realisasi Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) Tahun 2024



Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER: **SAMPAI DENGAN** | DESEMBER

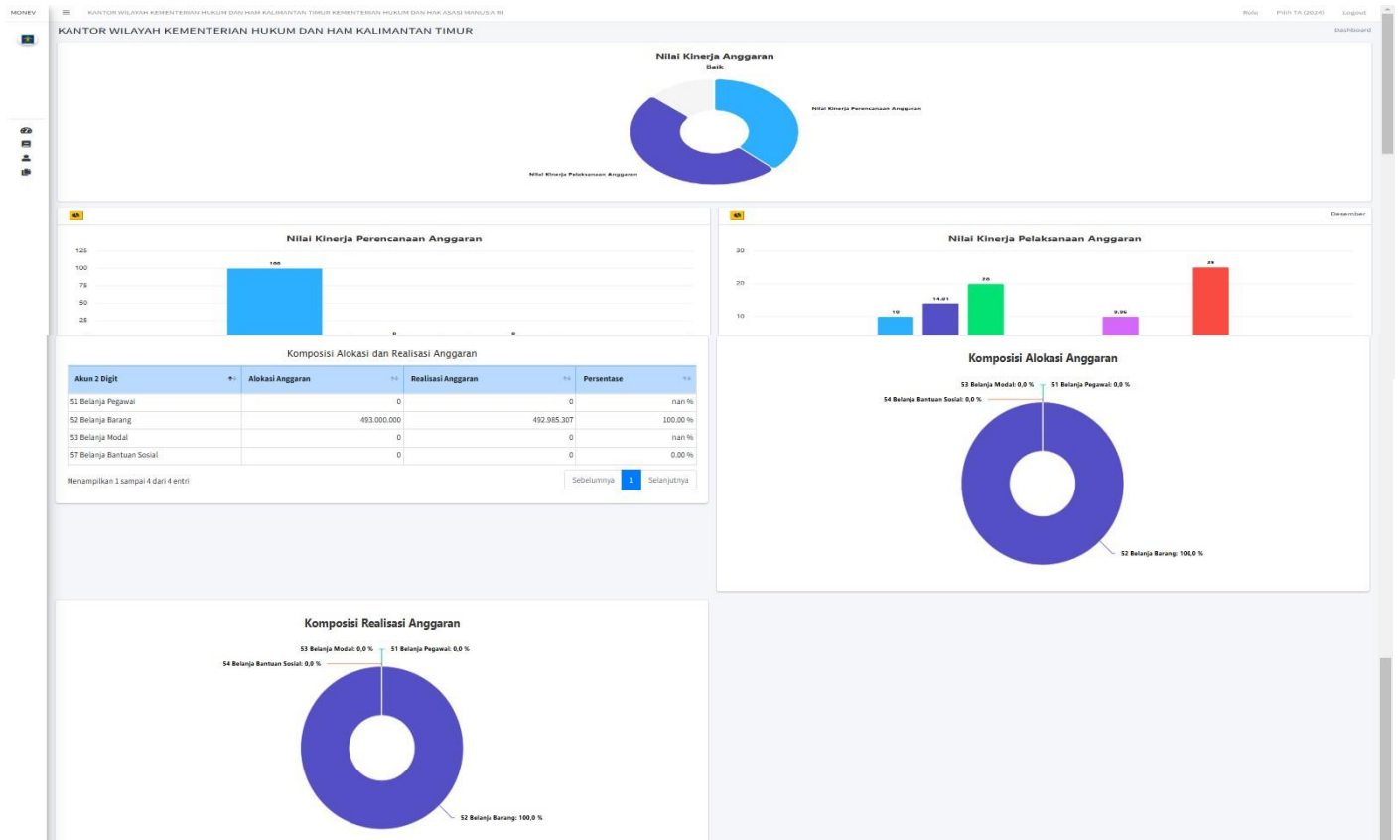
NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP					
1	046	013	408856	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	Nilai	100,00	90,59	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	68,59	70%	0,00	97,98
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10,00	13,59	20,00	0,00	0,00	0,00	25,00				
					Nilai Aspek	95,30		100,00				100,00				

Pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) di Kantor Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2024 nilai Smart Kantor Wilayah Kalimantan Timur adalah sebesar 86,5 (baik), dan nilai IKPA sebesar 97,98.

Dengan jumlah alokasi Tahun 2024 sebesar Rp. 1.489.616.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.489.107.140,- (99,97%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 508.860,-.

6. Program Pembentukan Regulasi (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)

Capaian SMART, IKPA dan Realisasi Anggaran Program PembentukanRegulasi (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan) Tahun 2024



MONEVPA

Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER: SAMPAI DENGAN | DESEMBER

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP					
1	046	013	408857	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	Nilai	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	70%	0,00	14,29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					Nilai Aspek	50,00			0,00			0,00				

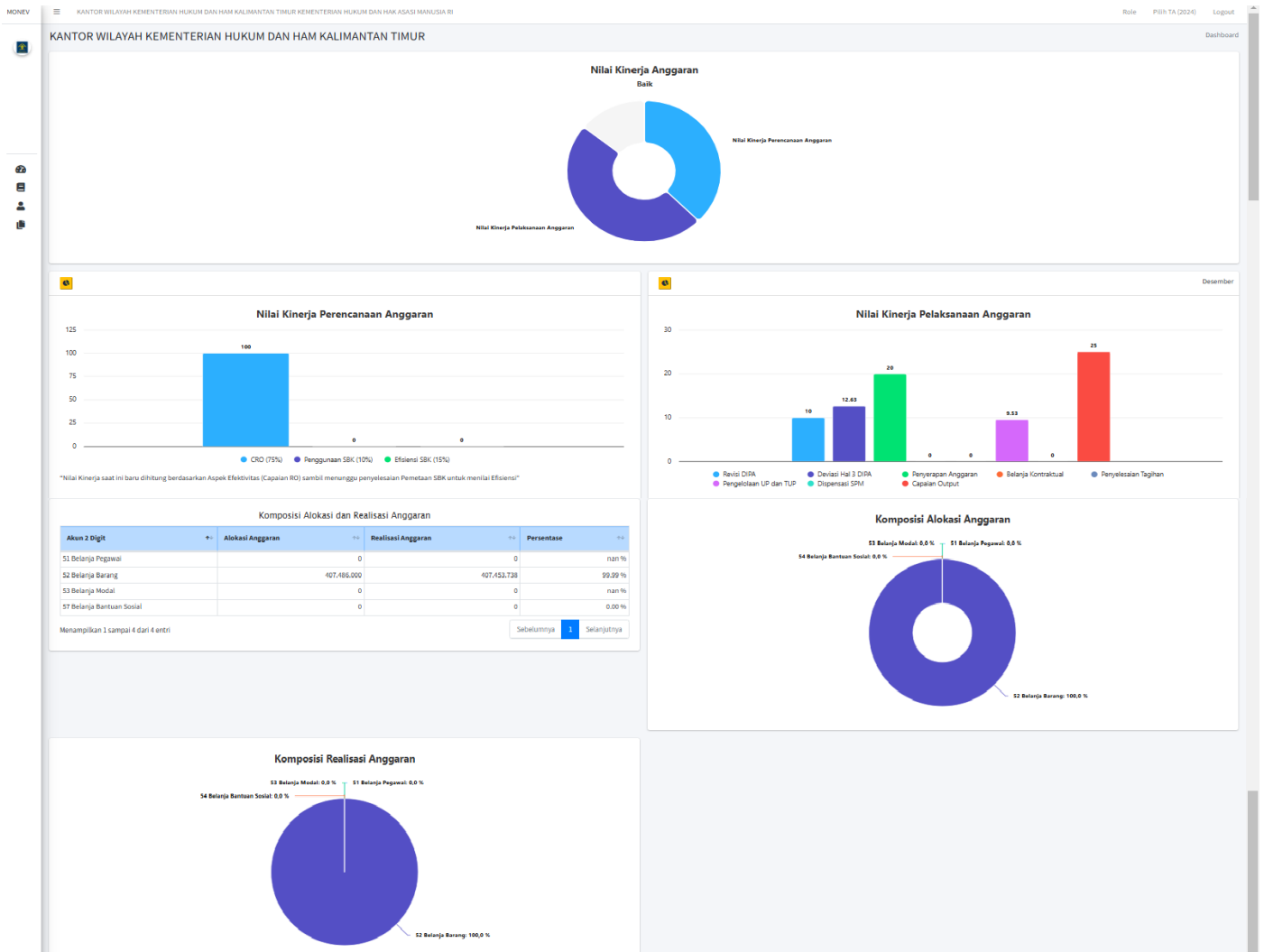
Pada Program Pembentukan Regulasi (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- undangan) di Kantor Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2024 nilai Smart Kantor Wilayah Kalimantan Timur adalah sebesar 86,86

dan nilai IKPA sebesar 14,29.

Dengan jumlah alokasi Tahun 2024 sebesar Rp. 493.000.000,- dapat direalisasikan Kantor Wilayah Kalimantan Timur sebesar Rp. 492.985.307,- (100%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 14.693,-.

7. Program Pemajuan dan Penegakan HAM (Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia)

Grafik 3.14. Capaian SMART, IKPA dan Realisasi Anggaran Program Pemajuan dan Penegakan HAM (Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia) Tahun 2024



Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER: **SAMPAI DENGAN | DESEMBER**

CARI DI HALAMAN... Q

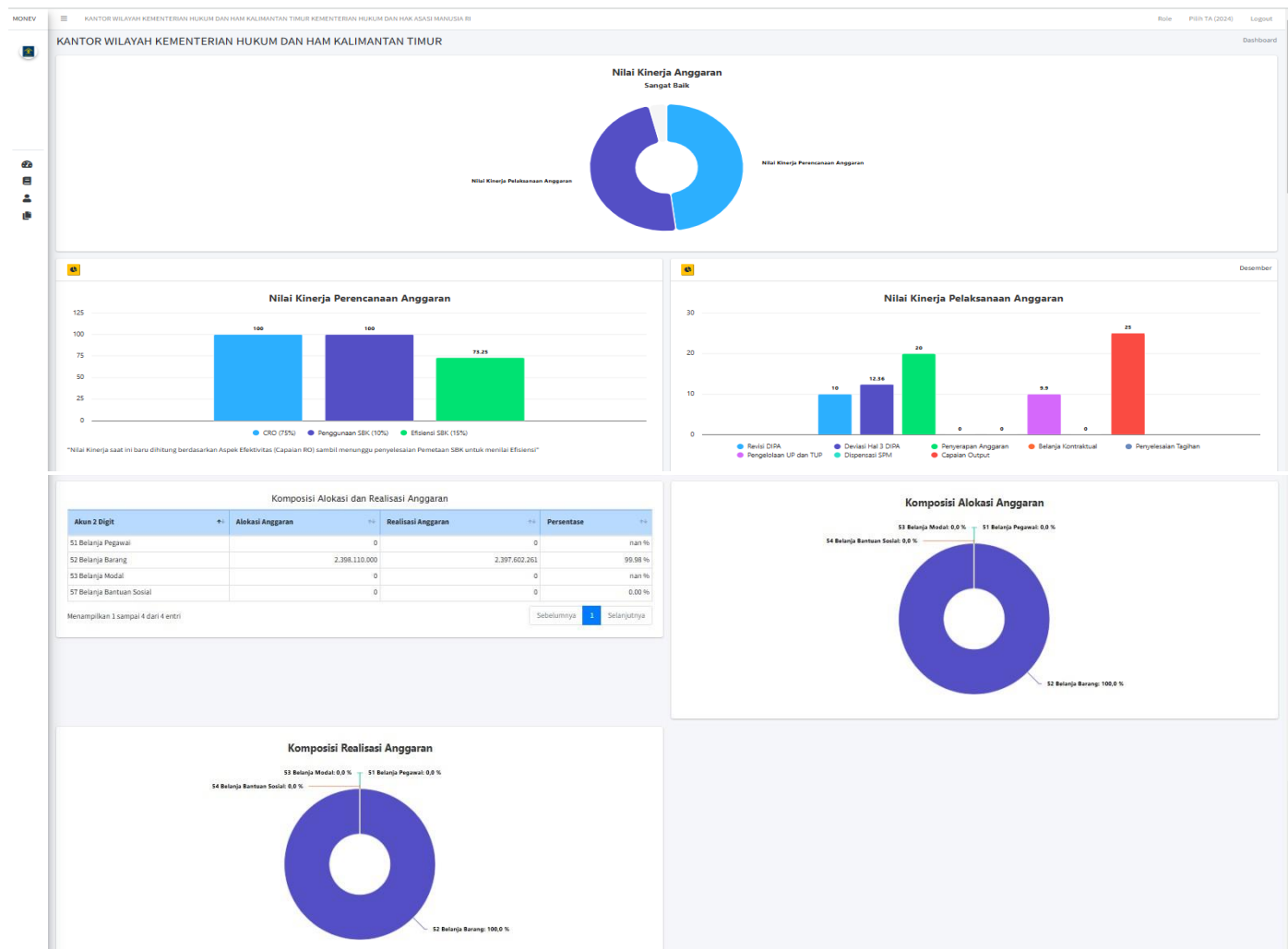
NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP					
1	046	013	408858	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	Nilai	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	70%	0,00	14,29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					Nilai Aspek		50,00			0,00		0,00				

Pada Program Pemajuan dan Penegakan HAM (Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia) di Kantor Wilayah Kalimantan Timur tahun 2024 nilai Smart Kantor Wilayah Kalimantan Timur adalah sebesar 85.73 dan nilai IKPA sebesar 14.29.

Dengan jumlah alokasi Tahun 2024 sebesar Rp. 407.486.000,- dapat direalisasikan Kantor Wilayah Kalimantan Timur sebesar Rp. 407.453.738,- (99,99%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 32.262,-.

8. Program Pembentukan Regulasi (Badan Pembinaan Hukum Nasional)

Capaian SMART, IKPA dan Realisasi Anggaran Program Pembentukan Regulasi (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Tahun 2024



Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER: SAMPAI DENGAN | DESEMBER

CARI DI HALAMAN... Q

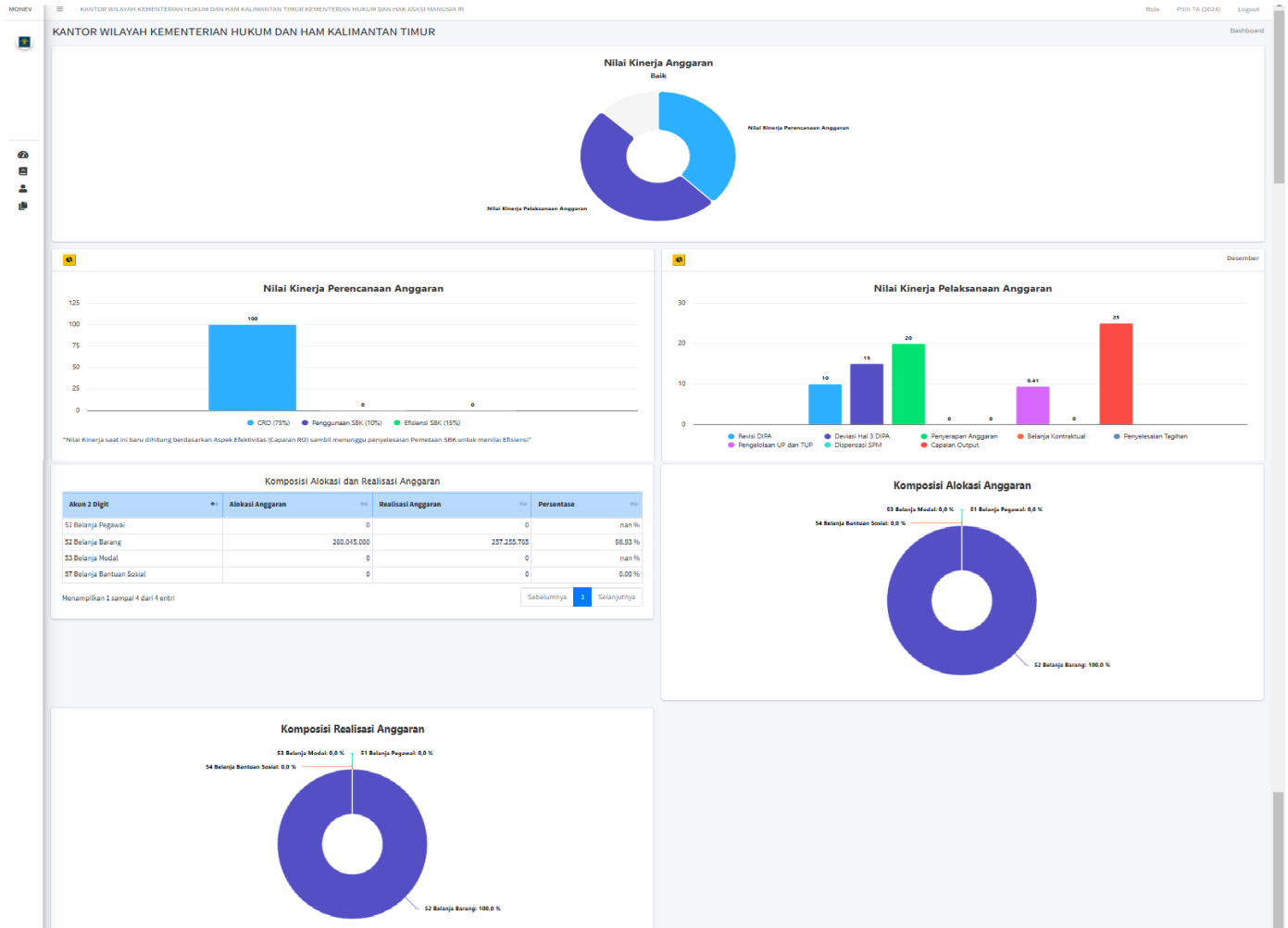
NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN			KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT					
1	046	013	408859	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	Nilai	100.00	82.40	100.00	0.00	0.00	99.01	100.00	77.26	80%	0.00	96.58	
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	12.36	20.00	0.00	0.00	9.90	25.00					
					Nilai Aspek		91.20			99.51		100.00					

Pada Program Pembentukan Regulasi (Badan Pembinaan Hukum Nasional) di Kantor Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2024 nilai Smart Kantor Wilayah Kalimantan Timur adalah sebesar 96,29 dan nilai IKPA sebesar 96,58.

Dengan jumlah alokasi Tahun 2024 sebesar Rp. 2.398.110.000,- dapat direalisasikan Kantor Wilayah Kalimantan Timur sebesar Rp. 2.397.602.261,- (99,98%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 507.739,-.

9. Program Dukungan Manajemen (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)

Capaian SMART, IKPA dan Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM) Tahun 2024



Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER: SAMPAI DENGAN | DESEMBER

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP					
1	046	013	408860	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	94.05	100.00	79.41	80%	0.00	99.26
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.41	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		97.03				100.00				

Pada Program Dukungan Manajemen (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM) di Kantor Wilayah Kalimantan Timur tahun 2021 nilai Smart Kantor Wilayah Kalimantan Timur adalah sebesar 85,65, dan nilai IKPA sebesar 99,46.

Dengan jumlah alokasi Tahun 2024 sebesar Rp.200,351,000,- dapat direalisasikan Kantor Wilayah Kalimantan Timur sebesar Rp.200,324,955,- (99,99%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 26,045,-.

D. Capaian Kinerja Lainnya Capaian Kinerja E-Performance

Berikut merupakan capaian kinerja kantor wilayah Kalimantan Timur Tahun 2024 melalui laman <https://e-performance.kemenkumham.go.id/>



Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

E-PERFORMANCE
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Hai Divisi Administrasi Kalimantan Timur, Selamat Datang di E-PERFORMANCE. >> Login : Kamis, 02 Januari 2025 | 09:48:29 WIB

Home

TAHUN: 2024 | Tabulasi Pengukuran Kinerja | KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR | Tampilkan

ID	NAMA UNIT	CAPAIAN KINERJA	TIDAK ADA TARGET	TIDAK TERCAPI (<100%)					Total	TERCAPI (100%)	MELEBIHI TARGET (>100%)	JUMLAH INDIKATOR
				00.00 s/d 49.99	50.00 s/d 64.99	65.00 s/d 74.99	75.00 s/d 89.99	90.00 s/d 99.99				
40	KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR	TW1	25							5	1	30
		TW2	23							5	2	30
		TW3	25							5	1	30
		TW4	2			1	1	2		21	5	30
4010	DIVISI ADMINISTRASI KALIMANTAN TIMUR	TW1	1							1		2
		TW2	1							1		2
		TW3	1							1		2
		TW4	1							1	1	2
4011	DIVISI PEMASYARAKATAN KALIMANTAN TIMUR	TW1							1		1	

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

TAHUN:

Eselon I:

Eselon II:

LAPORAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN : 2024
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
DIVISI ADMINISTRASI KALIMANTAN TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	CASCADING		TARGET				REALISASI		CATATAN MONITORING	
				KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH (%)	URAIAN	LAMPIRAN		
1.	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM			100 Persen: Triwulan IV	TW1	25	Persen	25	100	Januari : Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Rencana KEja Tahunan Reformasi Birokrasi dengan Lembar Kerja Evaluasi WBK/WBSBM pada Kamwil Kemendikhum Kalim untuk periode B.03 tahun 2024 telah mencapai 100%	

LAPORAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN : 2024
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
DIVISI ADMINISTRASI KALIMANTAN TIMUR

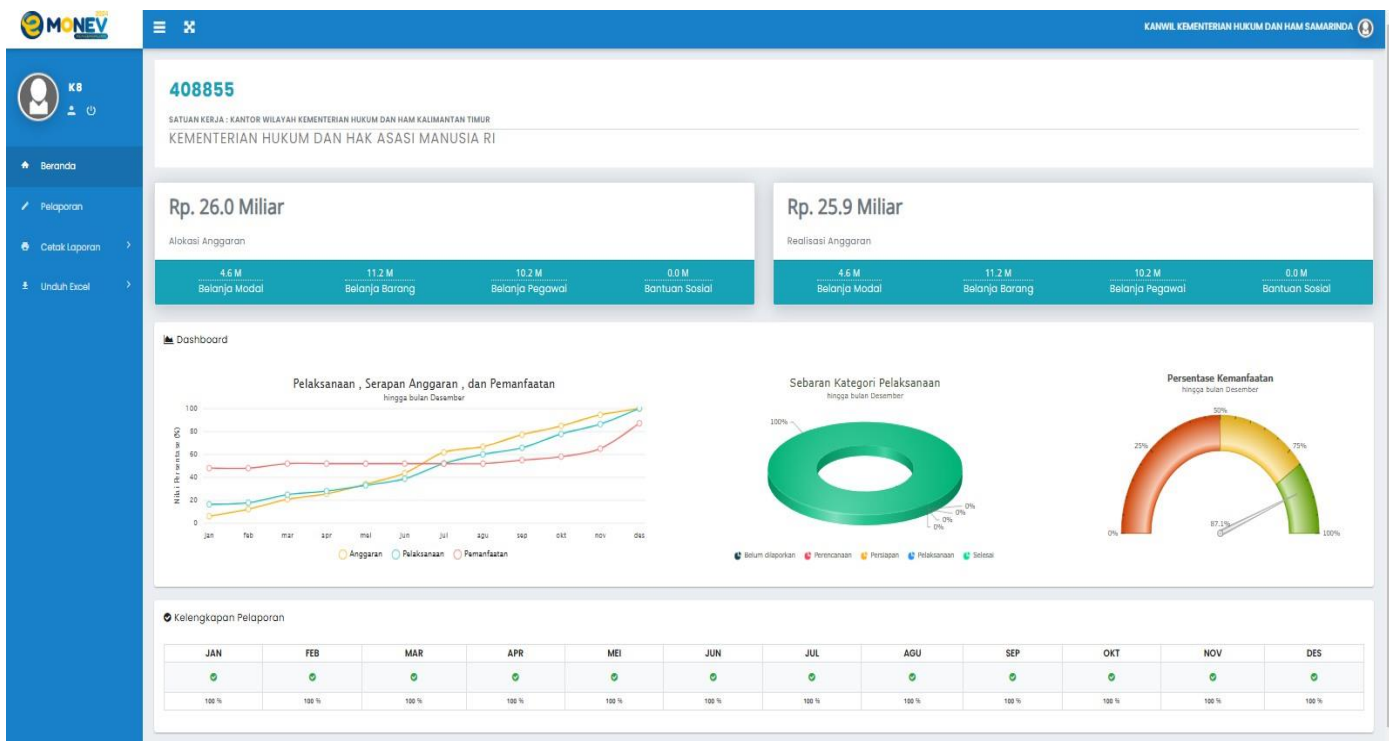
NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	CASCADING		TARGET				REALISASI		CATATAN MONITORING	
				KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH (%)	URAIAN	LAMPIRAN		
1.	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM			100 Persen: Triwulan IV	TW1	25	Persen	25	100	Januari : Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Rencana KEja Tahunan Reformasi Birokrasi dengan Lembar Kerja Evaluasi WBK/WBSBM pada Kamwil Kemendikhum Kalim untuk periode B.03 tahun 2024 telah mencapai 100% Februari: Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Rencana KEja Tahunan Reformasi Birokrasi dengan Lembar Kerja Evaluasi WBK/WBSBM pada Kamwil Kemendikhum Kalim untuk periode B.03 tahun 2024 telah mencapai 100% Maret: Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Rencana KEja Tahunan Reformasi Birokrasi dengan Lembar Kerja Evaluasi WBK/WBSBM pada Kamwil Kemendikhum Kalim untuk periode B.03 tahun 2024 telah mencapai 100%	
							TW2	25	Persen	25	100	April : Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Rencana KEja Tahunan Reformasi Birokrasi dengan Lembar Kerja Evaluasi WBK/WBSBM pada Kamwil Kemendikhum Kalim untuk periode B.06 tahun 2024 telah mencapai 100% Mei: Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Rencana KEja Tahunan Reformasi Birokrasi dengan Lembar Kerja Evaluasi	

Penginputan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur dalam aplikasi *e-performance* dilakukan secara periodik tiap triwulan I-IV di Tahun 2024.

Capaian Kinerja E-Monev Bappenas

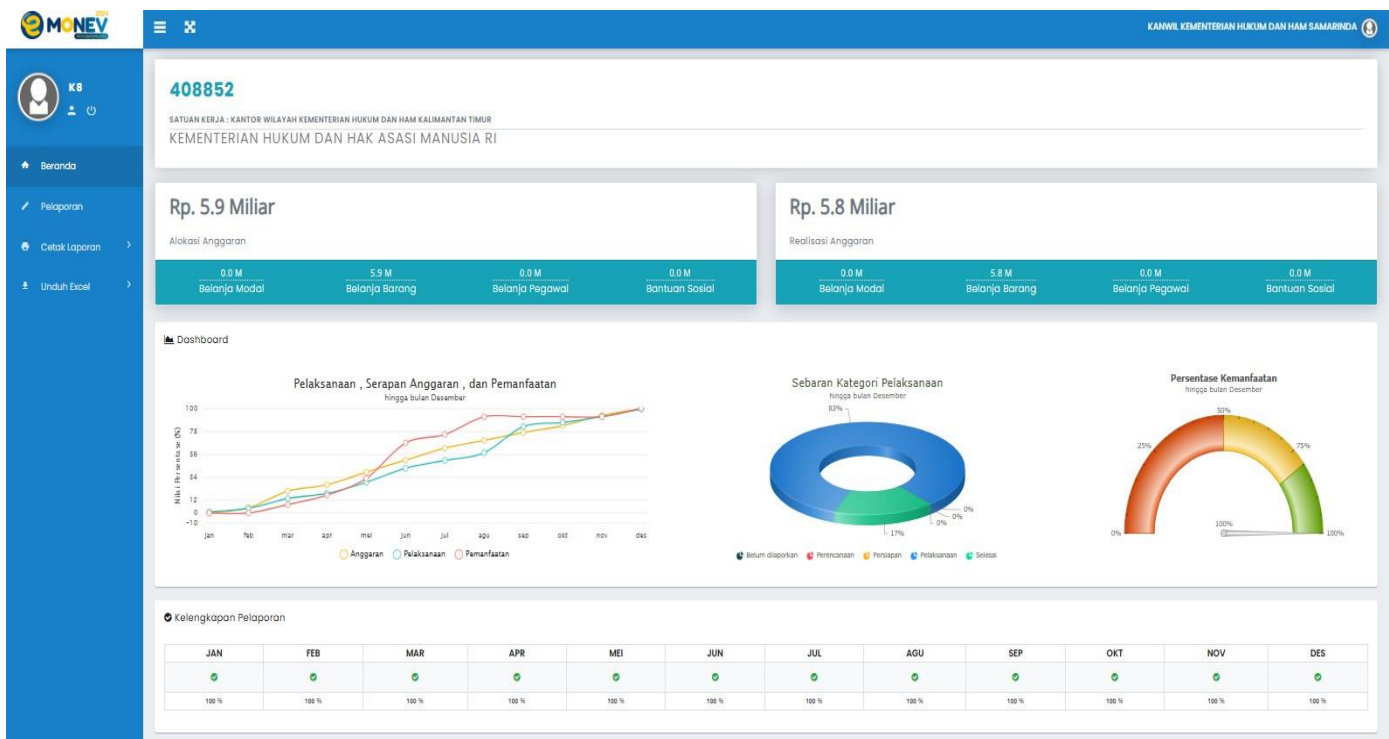
Capaian kinerja kantor wilayah kemenkumham kalimantan timur tahun 2024 melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id/>:

Program Sekretariat Jenderal



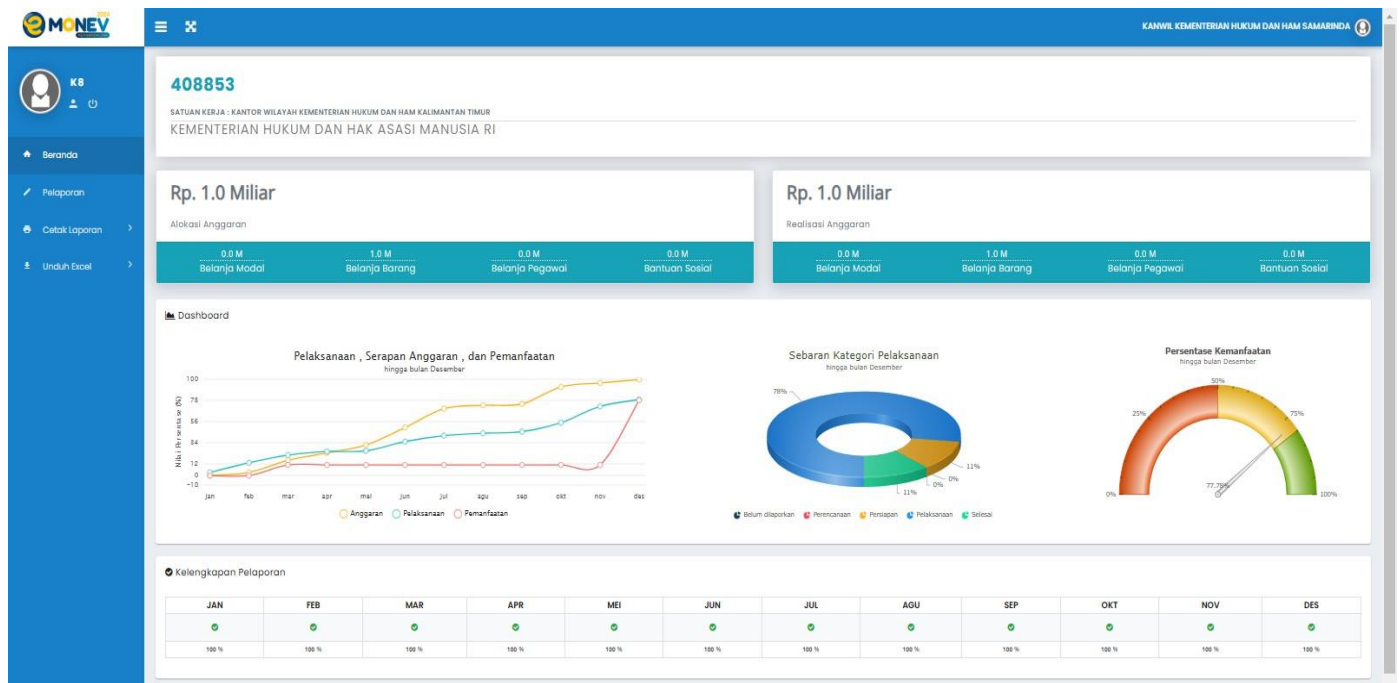
Pada Program Sekretariat Jenderal berdasarkan hasil tangkapan layar diatas terlihat bahwa pemantauan dari segi perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan di Tahun 2024 telah tercapai 100%.

Program Ditjen Administrasi Hukum Umum



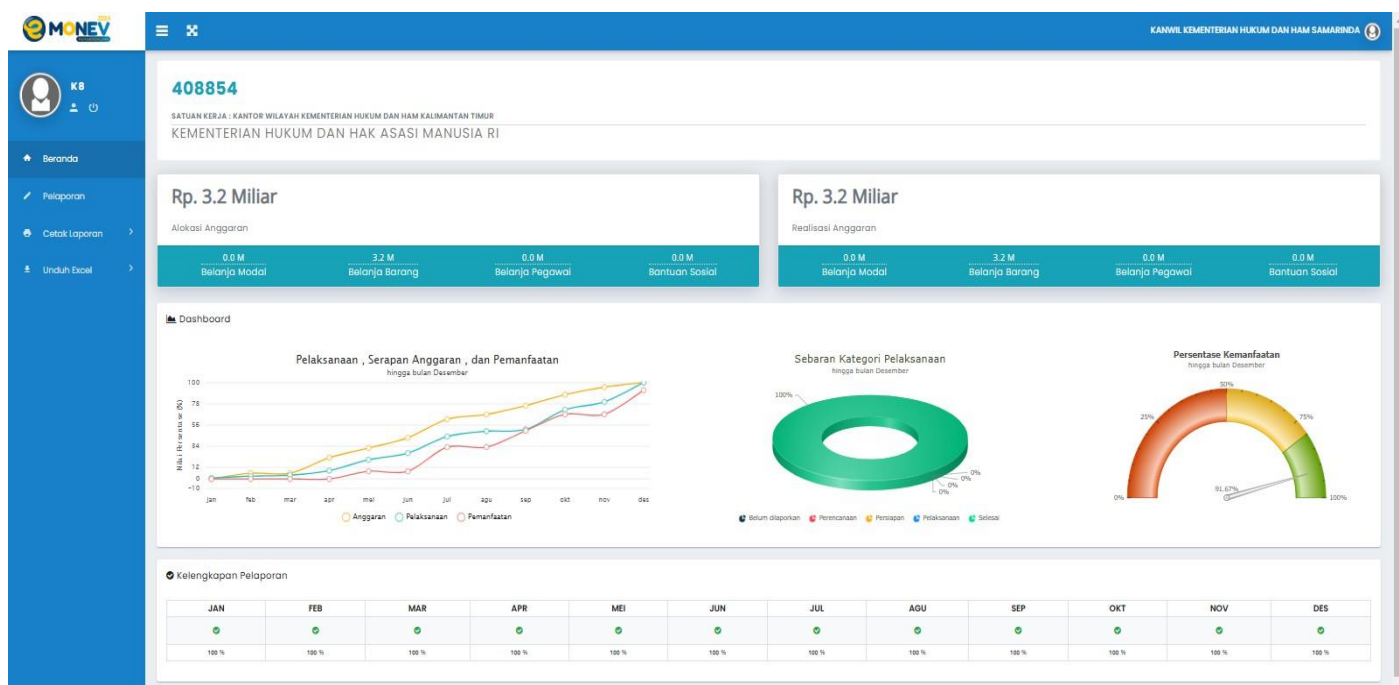
Pada Program Ditjen Adiministrasi Hukum Umum berdasarkan hasil tangkapan layar diatas terlihat bahwa pemantauan dari segi perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan di Tahun 2024 telah tercapai 100%.

Program Ditjen Pemasyarakatan



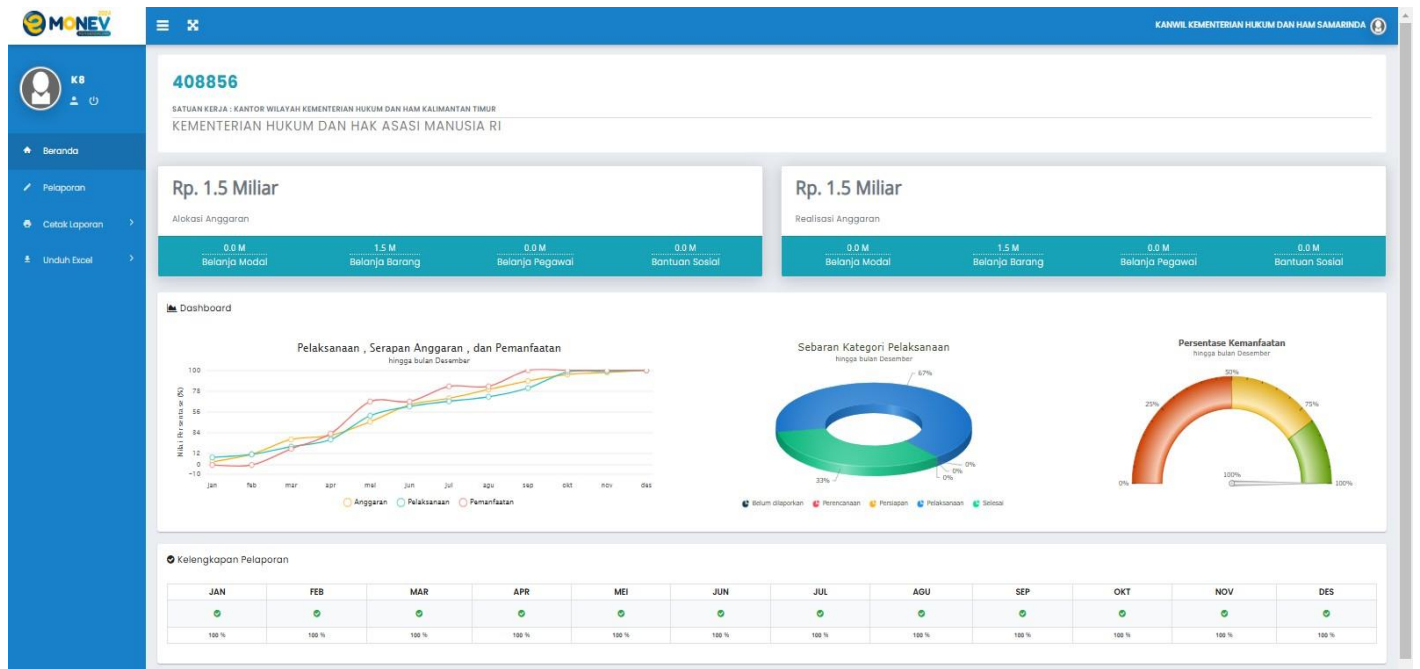
Pada Program Ditjen Pemasyarakatan berdasarkan hasil tangkapan layar diatas terlihat bahwa pemantauan dari segi perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan di Tahun 2024 telah tercapai 100%.

Program Ditjen Imigrasi



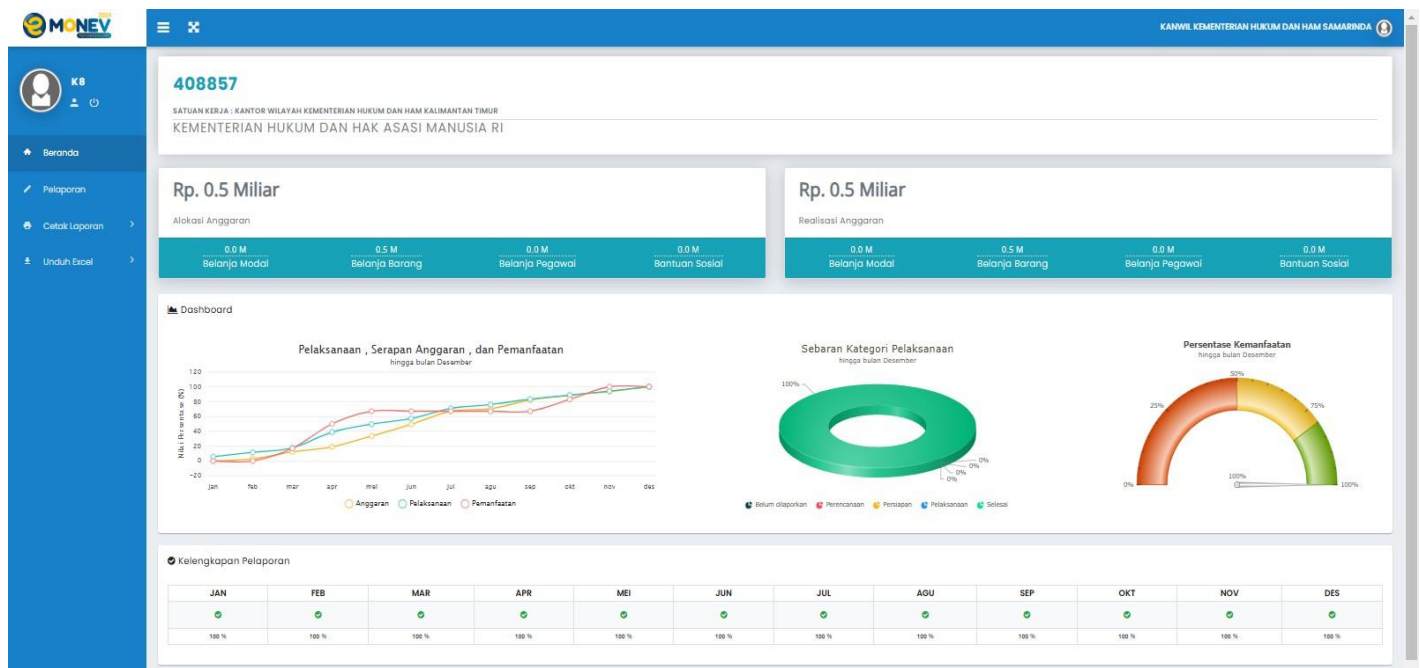
Pada Program Ditjen Imigrasi berdasarkan hasil tangkapan layar diatas terlihat bahwa pemantauan dari segi perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan di Tahun 2024 telah tercapai 100%.

Program Ditjen Kekayaan Intelektual



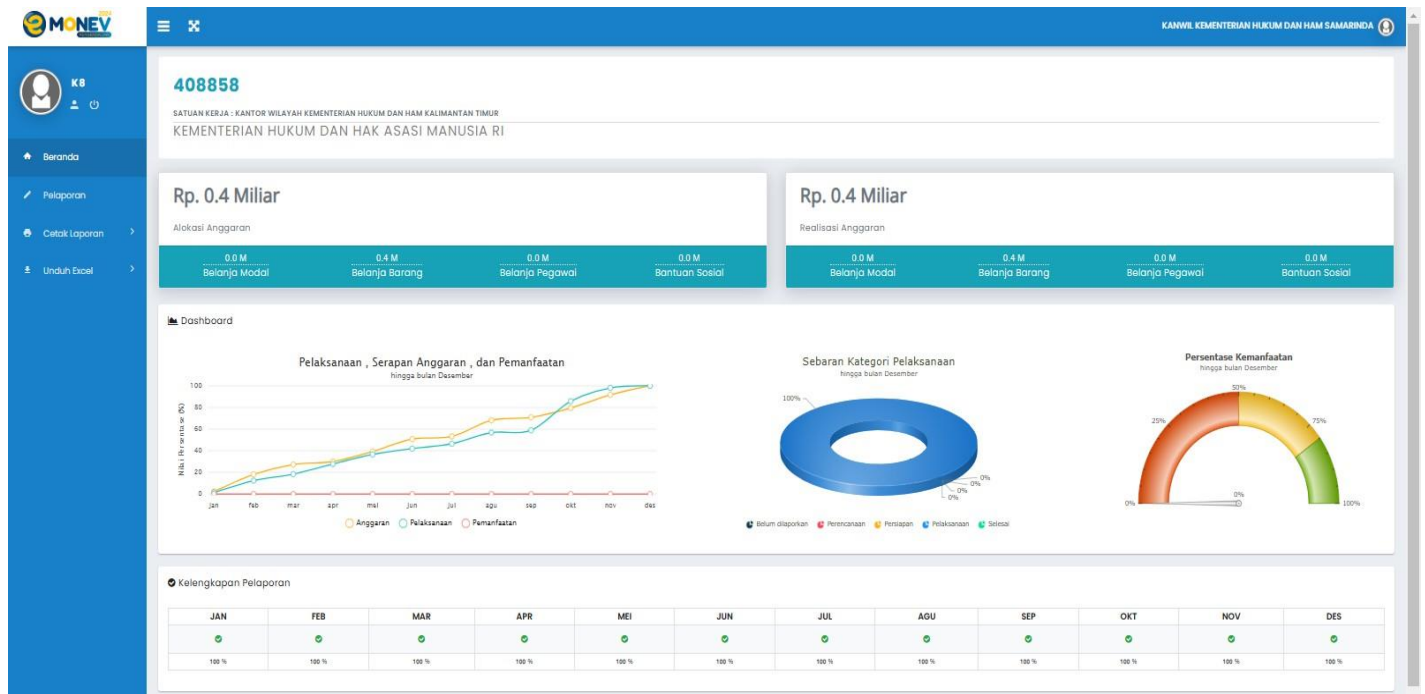
Pada Program Ditjen Kekayaan Intelektual berdasarkan hasil tangkapan layar diatas terlihat bahwa pemantauan dari segi perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan di Tahun 2024 telah tercapai 100%.

Program Ditjen Peraturan Perundang-undangan



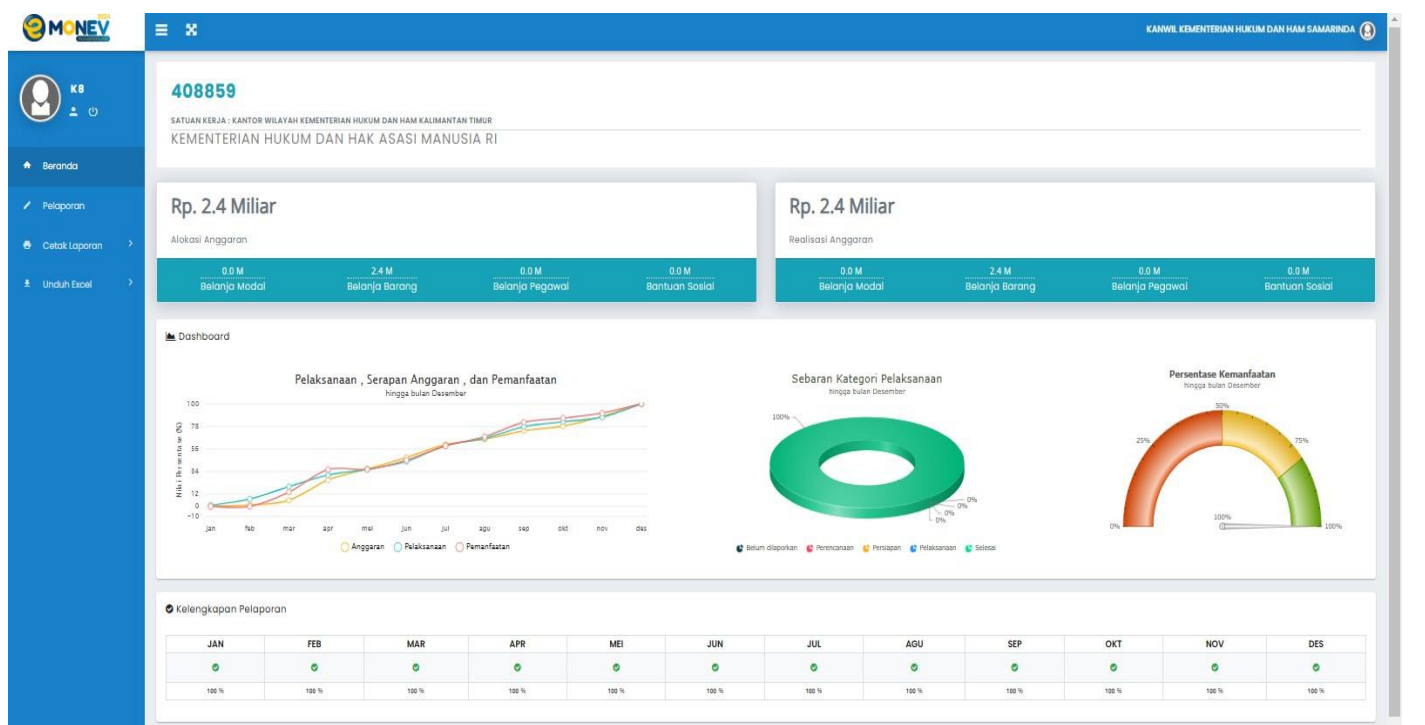
Pada Program Ditjen Peraturan Perundang-undangan berdasarkan hasil tangkapan layar diatas terlihat bahwa pemantauan dari segi perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan di Tahun 2024 telah tercapai 100%.

Program Ditjen Hak Asasi Manusia



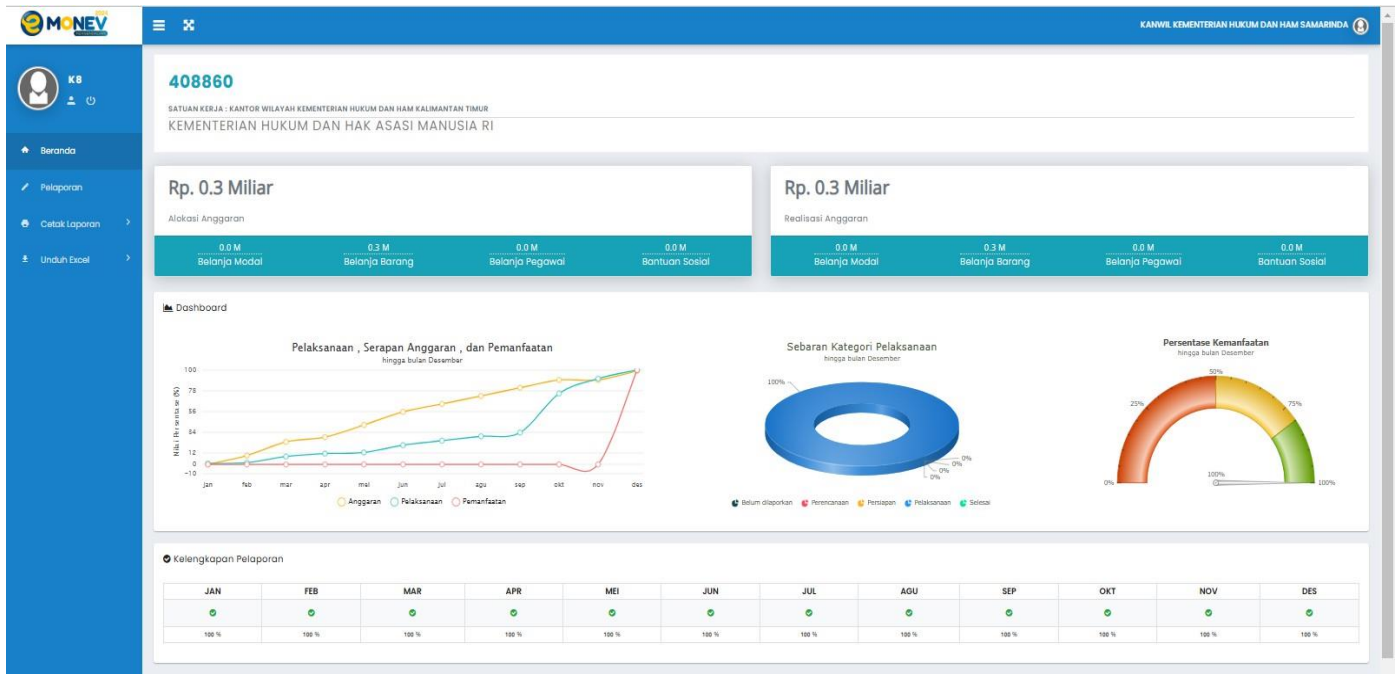
Pada Program Ditjen Hak Asasi Manusia berdasarkan hasil tangkapan layar diatas terlihat bahwapemantauan dari segi perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan di Tahun 2024 telah tercapai 100%.

Program Badan Pembinaan Hukum Nasional



Pada Program Badan Pembinaan Hukum Nasional berdasarkan hasil tangkapan layar diatas terlihat bahwa pemantauan dari segi perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan di Tahun 2024 telah tercapai 100%.

Program Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia



Pada Program Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan hasil tangkapan layar diatas terlihat bahwa pemantauan dari segi perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan di Tahun 2024 telah tercapai 100%.

A. Simpulan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur secara umum dapat merealisasikan target capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah disepakati pada awal Tahun 2024, meskipun terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai sesuai dengan targetnya sampai dengan Tahun 2024 ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur tetap optimis dan berkomitmen untuk memperbaiki dan berupaya sebaik mungkin untuk meningkatkan capaian kinerja di periode selanjutnya.

Berdasarkan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur pada Tahun 2024 yang tercerminkan dari capaian dalam Perjanjian Kinerja, SMART, IKPA dan kinerja anggaran maka dapat disimpulkan bahwa Kantor Wilayah Kalimantan Timur telah berupaya semaksimal mungkin dalam mewujudkan dan merealisasikan target yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia, anggaran, dan dari segi sarana prasarananya.

Dari total jumlah seluruh alokasi pagu anggaran dari 9 DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur pada Tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan alokasi pagu anggaran pada tahun 2023.

B. Saran

Berdasarkan simpulan dan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur dapat kami sampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai bahan penyusunan strategi mencapai kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya;

2. Diperlukan upaya peningkatan nilai SAKIP Kantor Wilayah melalui kegiatan pendampingan penyusunan LKjIP satuan kerja oleh Kantor Wilayah sebagai keseragaman pelaporan;
3. Dengan peningkatan volume pekerjaan dan demi tercapainya kinerja yang optimal, maka diperlukan penganggaran yang mencukupi pada tahun anggaran berikutnya;
4. Percepatan realisasi anggaran harus terus ditingkatkan sehingga target realisasi anggaran tercapai dengan maksimal pada tahun berikutnya;
5. Perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Instansi eksternal/terkait lainnya dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, agar kegiatan selanjutnya dapat lebih terprogram dan berjalan sesuai yang diharapkan;
6. Demi terselenggaranya pelayanan yang lebih baik dan optimal diperlukan penambahan, pelatihan dan melakukan penguatan kompetensi pegawai melalui implementasi Corpu, mengoptimalkan sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan di Kantor Wilayah Kalimantan Timur.

Demikian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur Tahun 2024 kami buat untuk menjadi periksa dan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.



Samarinda, 15 Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. M. IKMAL IDRUS, SH., MH
NIP. 196903182003121002

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gun Gun Gunawan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.I.K.,M.H.
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.I.K.,M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Kalimantan Timur

Gun Gun Gunawan
NIP 197304011997031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	100 % 3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 18.774.380.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp 18.774.380.000,-

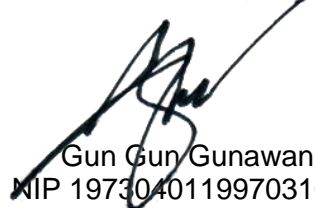
Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal



Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.I.K., M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Kalimantan Timur



Gun Gun Gunawan
NIP 197304011997031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gun Gun Gunawan

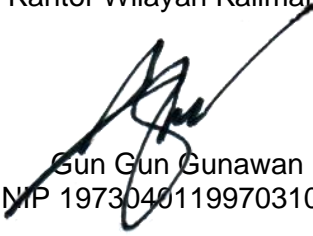
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur


Gun Gun Gunawan
NIP 197304011997031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gun Gun Gunawan

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Cahyo R. Muzhar

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Cahyo R. Muzhar
NIP 196909181994031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur

Gun Gun Gunawan
NIP 197304011997031001

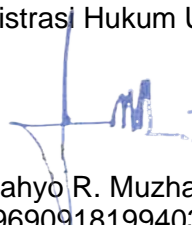
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 5.859.270.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 5.859.270.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum


Cahyo R. Muzhar
NIP 196909181994031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur


Gun Gun Gunawan
NIP 197304011997031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gun Gun Gunawan

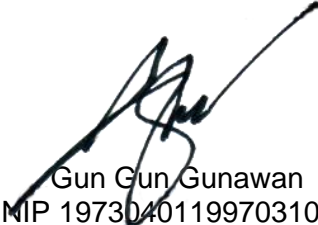
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur


Gun Gun Gunawan
NIP 197304011997031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gun Gun Gunawan

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Reynhard Silitonga

Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

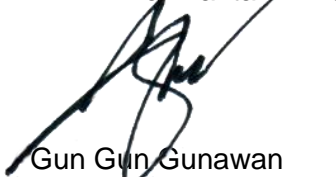
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan


Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM RI Kalimantan Timur


Gun Gun Gunawan
NIP. 197304011997031001

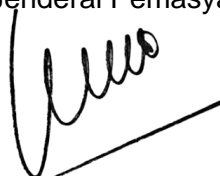
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KALIMANTAN TIMUR DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	1. Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	3,6 Indeks
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

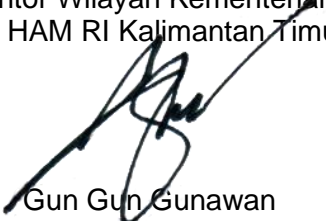
Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 128.509.350.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp 128.509.350.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp137.965.754.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Pemasarakatan	Rp137.965.754.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasarakatan


Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM RI Kalimantan Timur


Gun Gun Gunawan
NIP.197304011997031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gun Gun Gunawan

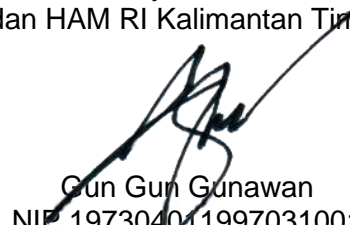
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Kalimantan Timur

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM RI Kalimantan Timur


Gun Gun Gunawan
NIP.197304011997031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gun Gun Gunawan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Silmy Karim
Jabatan : Direktur Jenderal Imigrasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Imigrasi

Silmy Karim

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur

Gun Gun Gunawan
NIP. 197304011997031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR
DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Wilayah yang Ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang Ditangani	90%
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah	Persentase Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diterima	90%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 18.555.549.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 18.555.549.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 64.967.200.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 64.967.200.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal Imigrasi



Silmy Karim

Pihak Pertama,
 Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur



Gun Gun Gunawan
 NIP. 197304011997031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gun Gun Gunawan

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur

Gun Gun Gunawan
NIP. 197304011997031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gun Gun Gunawan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

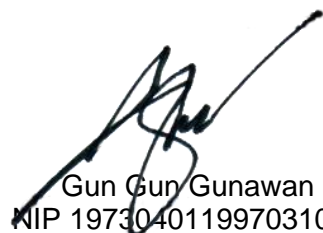
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur

Min Usihen
NIP 196903091994032001


Gun Gun Gunawan
NIP 197304011997031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN TIMUR DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%

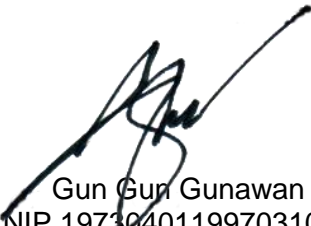
Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 1.489.616.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 1.489.616.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur

Min Usihen
NIP 196903091994032001


Gun Gun Gunawan
NIP 197304011997031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gun Gun Gunawan

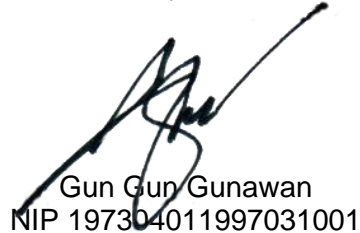
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur


Gun Gun Gunawan
NIP 197304011997031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gun Gun Gunawan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Asep Nana Mulyana
Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Asep Nana Mulyana
Jaksa Utama NIP 196908141996031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur

Gun Gun Gunawan
NIP 197304011997031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN TIMUR DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80 %
2.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	11 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 493.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 493.000.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Asep Nana Mulyana
Jaksa Utama NIP 196908141996031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur

Gun Gun Gunawan
NIP 197304011997031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

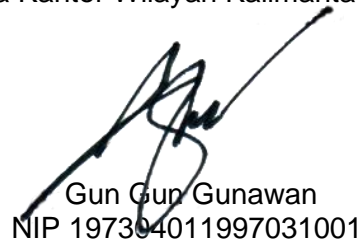
Nama : Gun Gun Gunawan

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur


Gun Gun Gunawan
NIP 197304011997031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gun Gun Gunawan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Dhahana Putra
Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Dr. Dhahana Putra
NIP 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur

Gun Gun Gunawan
NIP 197304011997031001

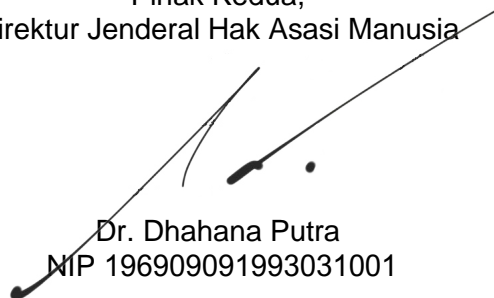
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR
DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	1. Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%
		2. Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%
		3. Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%
		4. Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%
		5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 Indeks
2.	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%

Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 407.486.000,-
Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Rp. 407.486.000,-

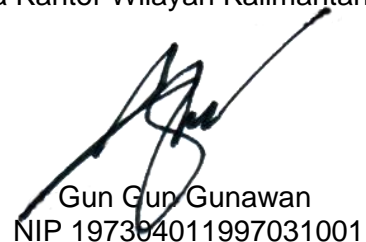
Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia



Dr. Dhahana Putra
NIP 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur



Gun Gun Gunawan
NIP 197304011997031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gun Gun Gunawan

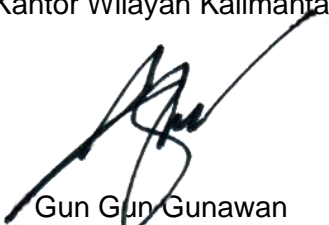
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur


Gun Gun Gunawan
NIP 197304011997031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gun Gun Gunawan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Widodo Ekatjahjana
NIP 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur

Gun Gun Gunawan
NIP 197304011997031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN TIMUR DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

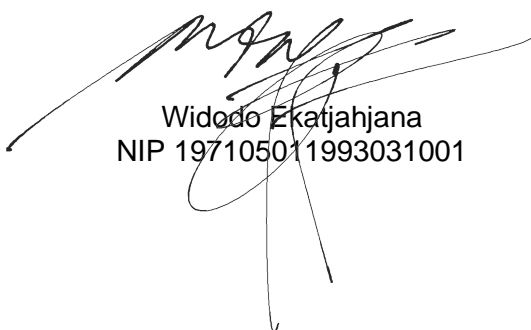
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %
3.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %
		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %
4.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %

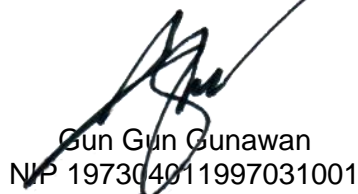
Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 133.642.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 133.642.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 1.986.908.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 1.986.908.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur


Widodo Ekatjahjana
NIP 197105011993031001


Gun Gun Gunawan
NIP 197304011997031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gun Gun Gunawan

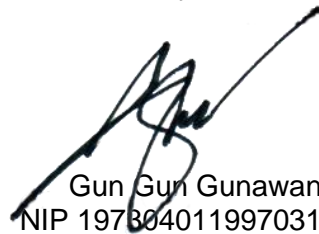
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur



Gun Gun Gunawan
NIP 197304011997031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gun Gun Gunawan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Y. Ambeg Paramarta
Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan HAM

Y. Ambeg Paramarta
NIP 196503221987031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Kalimantan Timur

Gun Gun Gunawan
NIP 197304011997031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN TIMUR DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN
HUKUM DAN HAM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 260.045.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Rp 260.045.000,-

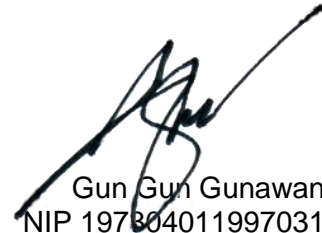
Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan HAM



Y. Ambeg Paramarta
NIP 196503221987031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Kalimantan Timur



Gun Gun Gunawan
NIP 197804011997031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gun Gun Gunawan

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Kalimantan Timur

Gun Gun Gunawan
NIP 197304011997031001